

**ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM
MENDUKUNG PEMBINAAN ATLET SEPAK TAKRAW:
(Studi Di Kota Bandar Lampung)**

(Skripsi)

Oleh

**ARDI TRI NURDYANSYAH
2256021034**



**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENDUKUNG PEMBINAAN ATLET SEPAK TAKRAW: (Studi Di Kota Bandar Lampung)

Oleh

ARDI TRI NURDYANSYAH

Pembinaan olahraga prestasi merupakan tanggung jawab pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan pemerintah daerah dalam mendukung pembinaan atlet sepak takraw berprestasi di Kota Bandar Lampung. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis kebijakan menggunakan teori William N. Dunn, sedangkan motivasi atlet dianalisis menggunakan teori kebutuhan David McClelland. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah melalui Dinas Pemuda dan Olahraga serta KONI Kota Bandar Lampung telah melaksanakan pembinaan melalui latihan rutin, keikutsertaan dalam kejuaraan, pemberian penghargaan, serta dukungan fasilitas latihan. Kebijakan tersebut telah berkontribusi terhadap pencapaian prestasi atlet sepak takraw hingga tingkat nasional. Namun, implementasi kebijakan belum sepenuhnya berjalan secara berkelanjutan. Pembinaan masih cenderung lebih intensif menjelang kompetisi, dukungan sarana dan prasarana masih terbatas, serta aspek kesejahteraan dan kepastian karier atlet masih memerlukan penguatan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan pembinaan yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 9 Tahun 2024 dengan pelaksanaannya di lapangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan pemerintah daerah dalam mendukung pembinaan atlet sepak takraw telah berjalan dan memberikan dampak positif terhadap prestasi atlet, namun masih diperlukan penguatan pada aspek pembinaan jangka panjang, sarana dan prasarana, serta dukungan kesejahteraan atlet agar sistem pembinaan olahraga prestasi dapat berlangsung secara lebih terstruktur dan berkelanjutan.pihak.

Kata Kunci: Kebijakan Pemerintah Daerah, pembinaan atlet, sepak takraw, olahraga prestasi, Perda Kota Bandar Lampung Nomor 9 Tahun 2024.

ABSTRACT

ANALYSIS OF LOCAL GOVERNMENT POLICY IN SUPPORTING THE DEVELOPMENT OF ACHIEVING SEPAK TAKRAW ATHLETES: (A Study in Bandar Lampung City)

By

ARDI TRI NURDYANSYAH

Achievement sport development is the responsibility of local governments as stipulated in Regional Regulation of Bandar Lampung City Number 9 of 2024 concerning Sports Administration. This study aims to analyze local government policies in supporting the development of outstanding sepak takraw athletes in Bandar Lampung City. This research employed a qualitative descriptive method with data collected through interviews, observations, and documentation. Data were analyzed through data reduction, data display, and conclusion drawing. William N. Dunn's policy analysis theory and David McClelland's motivation theory were used as analytical frameworks. The results show that the local government, through the Youth and Sports Office and KONI Bandar Lampung, has implemented athlete development programs through regular training, participation in competitions, rewards, and training facilities. These policies have contributed to athletes' achievements at the national level. However, policy implementation has not been fully sustainable. Athlete development tends to be intensified before competitions, facilities remain limited, and athlete welfare and career security still require improvement. These findings indicate a gap between the objectives mandated by Regional Regulation Number 9 of 2024 and their implementation in practice. This study concludes that local government policies have positively contributed to sepak takraw athlete achievements. However, strengthening long-term development programs, facilities, and athlete welfare is necessary to create a more structured and sustainable achievement sports development system.

Keywords: *local government policy, athlete development, sepak takraw, achievement sports, Regional Regulation of Bandar Lampung City Number 9 of 2024.*

**ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM
MENDUKUNG PEMBINAAN ATLET SEPAK TAKRAW:
(Studi Di Kota Bandar Lampung)**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

**Padaa Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

Oleh

**ARDI TRI NURDYANSYAH
2256021034**



**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
2026**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Mendukung Pembinaan Atlet Sepak Takraw: (Studi Di Kota Bandar Lampung)
Nama Mahasiswa : **Ardi Tri Nurdyansyah**
Nomor Pokok Mahasiswa : 2256021034
Program Studi : S-1 Ilmu Pemerintahan

Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. R. Pitojo Budiono, M.Si.
NIP. 196405081993031004

Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan


Dr. Tabah Maryanah, S.I.P., M.Si.
NIP. 197106042003122001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. R. Pitojo Budiono, M.Si.



Penguji Utama : Andri Marta, S.IP., M.IP.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.
NIP. 197608212000032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 2 Juni 2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi yang saya susun merupakan karya asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik Sarjana, baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Skripsi ini sepenuhnya merupakan gagasan, rumusan, dan hasil penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dan bimbingan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan menyebutkan nama pengarang serta dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh melalui skripsi ini, serta sanksi lain sesuai dengan ketentuan dan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 20 Mei 2026
Yang membuat pernyataan,



Ardi Tri Nurdyansyah
NPM. 2256021034

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Ardi Tri Nurdyansyah, lahir di Ngawi pada tanggal 31 Desember 2003. Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara, putra dari pasangan yang turut menjadi bagian penting dalam perjalanan dan kehidupan penulis. Pendidikan penulis dimulai dari TK Negeri 21 Mesuji pada 2009-2010. Selanjutnya, penulis menempuh pendidikan dasar di SD Negeri 2 Simpang Pematang pada tahun 2010–2016. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar, penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Mesuji pada tahun 2016–2019, kemudian meneruskan pendidikan menengah atas di SMA Global Madani pada tahun 2019–2022. Pada tahun 2022, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, pada tahun 2025 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Karya Mulya Sari, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan. Selain itu, penulis juga mengikuti program magang di Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kota Bandar Lampung pada tahun 2025 sebagai bentuk pengembangan pengalaman dan kompetensi di bidang pemerintahan.

MOTTO

“Semesta bekerja untuk mereka yang tetap percaya.”

“Di balik semua proses ini, ada doa yang tidak pernah berhenti.”

“Sesungguhnya Tuhanku bersamaku, Dia akan memberi petunjuk kepadaku.”

QS. Asy-Syu'ara: 62

PERSEMBAHAN



Dengan mengucap Alhamdulillah atas Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'la, sebagai rasa syukur dan terima kasih yang tulus, kupersembahkan skripsi ini

kepada:

Kedua orang tuaku, Bapak Suratman dan Ibu Siti Fitriyah

Terima Kasih atas doa yang tidak pernah terputus, kasih sayang yang tulus, serta pengorbanan yang tidak pernah terhitung nilainya. Setiap langkah yang kutempuh hingga saat ini tidak terlepas dari dukungan dan keikhlasan Bapak dan Ibu.

Ada banyak mimpi yang ingin kukejar setelah skripsi ini dibukukan. Aku akan menambah huruf di belakang nama yang Bapak dan Ibu berikan, sebagai wujud dari perjuangan dan doa yang menyertai setiap langkahku. Sebagai anak bungsu Laki-Laki satu-satunya, aku tumbuh dengan kasih yang begitu besar, sekaligus harapan yang aku jaga dalam diam. Namun, perjalanan ini belum selesai, masih banyak tangga kehidupan yang harus kudaki. Maka izinkan aku sesekali bersandar, pada bahu yang selalu menguatkanmu ketika lelah.

Almamater kebanggaan

Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillah, Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENDUKUNG PEMBINAAN ATLET SEPAK TAKRAW:(Studi Di Kota Bandar Lampung)”**. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi suri teladan bagi umat manusia.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan, sehingga diharapkan hasil yang diperoleh dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut serta referensi bagi penelitian selanjutnya, khususnya dalam bidang pelayanan publik dan komunikasi pemerintahan.

Merupakan suatu kehormatan dan kebanggaan bagi penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bantuan, serta doa dari berbagai pihak yang dengan tulus memberikan kontribusi. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., ASEAN Eng., selaku Rektor Universitas Lampung
2. Ibu Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

3. Bapak Prof. Dr. Noverman Duadji, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik
4. Bapak Dr. Arif Sugiono, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum
5. Bapak Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.IP., M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.
6. Ibu Dr. Tabah Maryanah selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan
7. Ibu Kris Ari Suryandar. S.I.P., M.I.P. selaku Dosen Pembimbing Akademik peneliti, yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
8. Bapak Dr. R. Pitojo Budion, M.Si.. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, atas bimbingan, arahan, dan keikhlasan yang senantiasa diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Terimakasih bapak, semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan dengan keberkahan ilmu, kesehatan, dan pahala yang terus mengalir.
9. Bapak Andri Marta,S.I.P, M.I.P. selaku Dosen Pembahas dan Penguji Utama, yang telah memberikan kritik, saran, serta masukan sehingga dapat membangun skripsi ini menjadi lebih baik. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan bapak dengan kesehatan, keberkahan, dan pahala yang berlipat.
10. Terima kasih kepada Dinas Kepumudaan Kota Bandar Lampung, khususnya Kepada Bapak Nero Rakhmat Akbar S.STP.MH. dan Para staf Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kota Bandar Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan kegiatan magang selama 5 bulan, serta memberikan bimbingan, arahan, dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Kepada KONI Kota Bandar Lampung, khususnya Bapak Mulvie Tamizudin Yunus, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan, bantuan, serta kesempatan yang diberikan kepada penulis selama proses penelitian dan penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas waktu, perhatian, serta informasi yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dengan baik. Segala

bantuan dan dukungan yang diberikan sangat berarti bagi penulis dalam menyelesaikan proses akademik ini. Semoga KONI Kota Bandar Lampung senantiasa terus berkembang dalam mendukung pembinaan dan kemajuan olahraga prestasi di daerah, serta segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT.

12. Kepada Bapak Suratman dan Ibu Siti Fitriyah saya tercinta, terima kasih atas segala doa, kasih sayang, pengorbanan, serta dukungan yang tiada henti dalam setiap langkah kehidupan penulis. Tidak ada kata yang mampu menggambarkan besarnya cinta dan ketulusan Bapak dan Ibu dalam mendidik, membimbing, dan memberikan segalanya demi masa depan penulis. Semoga setiap kebaikan, keikhlasan, dan perjuangan yang telah diberikan menjadi amal ibadah serta mendapat balasan terbaik dari Allah SWT, baik di dunia maupun di akhirat. Karya sederhana ini penulis persembahkan sebagai bentuk penghormatan, rasa bangga, dan ungkapan terima kasih yang mendalam kepada Bapak dan Ibu yang selalu menjadi sumber kekuatan, semangat, dan inspirasi dalam hidup penulis.
13. Teruntuk kedua kakakku tercinta, In Ulfatun Khasanah dan Milatus Solikhah, terima kasih atas segala dukungan, perhatian, nasihat, serta kasih sayang yang selalu diberikan kepada penulis. Kehadiran kalian sebagai kakak menjadi salah satu sumber semangat bagi penulis dalam menjalani setiap proses kehidupan. Terima kasih karena selalu membantu, menguatkan, dan memberikan motivasi kepada penulis dalam keadaan apa pun. Terima kasih juga kepada kakak iparku, Dadang dan Doni, atas segala perhatian, dukungan, serta kebaikan yang diberikan kepada penulis selama ini. Kehadiran kalian menambah kehangatan dan kebersamaan dalam keluarga. Semoga segala kebaikan dan ketulusan yang telah diberikan mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT. Untuk keempat ponakanku tersayang, Zia, Khalif, Nura, dan Hami, terima kasih telah menjadi sumber kebahagiaan dan warna indah dalam keluarga. Canda tawa dan kehadiran kalian memberikan semangat tersendiri bagi penulis. Semoga kalian selalu tumbuh

menjadi anak-anak yang sehat, pintar, membanggakan keluarga, serta senantiasa dilimpahi kebahagiaan dan keberkahan dalam kehidupan. Semoga hubungan kekeluargaan kita selalu dipenuhi kasih sayang, kebersamaan, dan keharmonisan hingga kapan pun.

14. Teruntuk seseorang yang tidak kalah penting dalam perjalanan penulis, Selli Calista Tritias Puspita. Terimakasih karena telah banyak membantu, mendukung, dan menemani penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Kehadiranmu memberikan semangat, perhatian, serta dukungan yang begitu berarti dalam setiap tahap perjuangan penulis, mulai dari proses awal penyusunan hingga akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Terimakasih atas waktu, bantuan, kesabaran, dan segala bentuk kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Dukungan yang kamu sudah berikan menjadi salah satu alasan penulis mampu bertahan dan terus berusaha melewati berbagai proses yang tidak mudah. Semoga segala kebaikanmu selalu dibalas dengan kebahagiaan, kesehatan, keberkahan, serta kemudahan dalam setiap langkah kehidupan yang dijalani.
15. Kepada sahabat dan teman-teman seperjuangan selama masa perkuliahan, Nayaka, Azka, Nanda, Mul, dan Ridho, penulis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan, dukungan, bantuan, serta berbagai cerita yang telah menjadi bagian dari perjalanan selama menempuh pendidikan di bangku kuliah. Terima kasih karena telah hadir sebagai teman yang mampu sedikit meredakan rasa lelah, pusing, dan tekanan di tengah proses perkuliahan maupun penyusunan skripsi ini. Canda tawa, obrolan sederhana, serta kebersamaan yang telah dilalui bersama menjadi warna tersendiri yang membuat perjalanan ini terasa lebih ringan dan bermakna. Penulis berharap setiap kenangan baik yang telah tercipta dapat selalu dikenang, serta semoga persahabatan dan silaturahmi yang telah terjalin tetap terjaga dengan baik meskipun nantinya masing-masing akan melangkah menuju jalan kehidupan yang berbeda. Semoga kita semua senantiasa diberikan

kesehatan, kebahagiaan, kesuksesan, dan keberkahan dalam setiap langkah ke depan.

16. Kepada teman-teman magang di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bandar Lampung, yaitu Fikri, Ikhsan, Azka, dan Fina, penulis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan, bantuan, serta pengalaman yang telah dilalui bersama selama kegiatan magang berlangsung. Kehadiran kalian memberikan suasana yang menyenangkan dan menjadi bagian dari cerita berharga selama proses belajar dan pengembangan diri penulis.

Terima kasih atas dukungan, kerja sama, serta berbagai momen kebersamaan yang telah membuat masa magang terasa lebih ringan dan penuh kenangan baik. Semoga hubungan silaturahmi yang telah terjalin dapat terus terjaga, dan semoga kalian semua senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan, kesuksesan, serta keberkahan dalam setiap langkah kehidupan ke depan.

17. Teruntuk diri sendiri, terima kasih telah mampu bertahan dan berjuang hingga sampai pada titik ini. Perjalanan yang dilalui tidak selalu mudah, ada banyak rasa lelah, kecewa, dan tekanan yang harus dihadapi, namun tetap memilih untuk bangkit dan melanjutkan semuanya dengan sebaik mungkin. Terima kasih karena tidak menyerah, meskipun sering kali keadaan terasa berat untuk dijalani. Terima kasih sudah terus belajar menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih sabar, dan lebih dewasa dalam menghadapi setiap proses kehidupan. Semua usaha, doa, air mata, dan perjuangan yang telah dilalui hingga penyusunan skripsi ini selesai merupakan bukti bahwa diri ini mampu melewati banyak hal yang sebelumnya terasa mustahil. Semoga setelah ini, langkah yang dijalani selalu dipenuhi dengan kebahagiaan, kesehatan, kemudahan, serta keberkahan. Semoga diri ini tetap menjadi pribadi yang rendah hati, tidak berhenti berkembang, dan selalu dipertemukan dengan orang-orang baik serta hal-hal baik yang pantas untuk diperjuangkan.

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR SINGKATAN	iv
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
II. TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Tinjauan Analisis Kebijakan	12
2.1.1 Definisi Analisis Kebijakan	12
2.2 Tinjauan Kebijakan Publik	16
2.2.1 Definisi Kebijakan Publik	16
2.2.2 Proses Pembuatan Kebijakan	19
2.2.3 Analisis Kebijakan Publik.....	21
2.3 Tinjauan Motivasi.....	23
2.3.1 Pengertian Motivasi	23
2.3.2 Teori Motivasi	24
2.4 Kerangka Pikir	27
III. METODE PENELITIAN	29
3.1 Tipe Penelitian	29
3.2 Lokasi Penelitian	31

3.3 Fokus Penelitian.....	33
3.4 Jenis dan Sumber Data	34
3.5 Informan Penelitian	35
3.6 Teknik Pengumpulan Data	36
3.7 Teknik Pengelolaan Data.....	38
3.8 Teknik Analisis Data.....	39
3.9 Teknik Keabsahan Data.....	40
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	43
4.1 Gambaran Umum.....	43
4.1.1 Sejarah Sepak Takraw	43
4.1.2 Sejarah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)	45
4.1.3 Profil KONI Kota Bandar Lampung	46
4.1.4 Visi Dan Misi KONI Kota Bandar Lampung	48
4.1.5 Tugas Pokok KONI Kota Bnadar Lampung	49
4.1.6 Struktur Organisasi KONI Kota Bandar Lampung	50
4.2 Hasil Penelitian	52
4.2.1 Kebijakan Pemerintah Daerah	54
4.2.2 Peran Pemerintah Daerah	56
4.2.3 Motivasi Atlet Sepak takraw	62
4.2.4 Kendala dalam Pembinaan Atlet Sepak Takraw	66
4.3 Pembahasan	69
4.3.1 Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah	69
4.3.1.1 Perumusan Masalah (<i>problem formulation</i>).....	72
4.3.1.2 Peramalan (<i>forecasting</i>).....	75
4.3.1.3 Rekomendasi (<i>recommendation</i>)	79
4.3.1.4 Pemantauan (<i>monitoring</i>)	83
4.3.1.5 Evaluasi (<i>evaluation</i>).....	87
4.3.2 Analisis Motivasi Atlet Berdasarkan Teori McClelland	90
4.3.2.1 <i>Need for Achievement</i>	91
4.3.2.2 <i>Need for Affiliation</i>	94
4.3.2.3 <i>Need for Power</i>	97
V. SIMPULAN DAN SARAN.....	104
5.1 Simpulan	104

5.2 Saran	106
DAFTAR PUSTAKA	108
LAMPIRAN	112

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Prestasi Atlet Sepak Takraw Kota Bandar Lampung.....	5
Tabel 2 . Penelitian Terdahulu.....	7
Tabel 3. Informan Penelitian	36
Tabel 4. Data Nama Atlet Sepak takraw Berprestasi.....	62

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Kerangka Pikir.....	28
Gambar 2. Komponen Analisis Data Interaktif Miles, dkk, 2014.....	39
Gambar 3. Pengujian Kredibilitas Data pada Penelitian Kualitatif	41
Gambar 4. Triangulasi Teknik.....	41
Gambar 5. Struktur Organisasi KONI	52
Gambar 6. Lapangan Sepak Takraw Kota Bandar Lampung.....	54

DAFTAR SINGKATAN

DBON	: Desain Besar Olahraga Nasional
DISPORA	: Dinas Kepemudaan Dan Olahraga
KONI	: Komite Olahraga Nasional Indonesia
PERDA	: Peraturan Daerah
PON	: Pekan Olahraga Nasional
SDM	: Sumber Daya Manusia
UU	: Undang-Undang
SDM	: Sumber Daya Manusia

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional Indonesia memiliki tujuan utama sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu instrumen strategis dalam mewujudkan tujuan tersebut adalah melalui bidang keolahragaan, yang berperan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, produktif, berkarakter, serta berdaya saing. Olahraga tidak hanya dipahami sebagai aktivitas fisik, melainkan juga sebagai sarana pembangunan sosial yang mampu membentuk disiplin, solidaritas, dan prestasi bangsa. Menurut Rahadian dkk. (2021), olahraga merupakan bagian penting dari pembangunan manusia dan pembangunan sosial yang mendukung kemajuan bangsa.

Dalam pembangunan olahraga, peran pemerintah menjadi sangat penting karena pemerintah memiliki tanggung jawab dalam merencanakan, mengatur, dan mendukung berbagai program keolahragaan. T. Cholik Mutohir (2014) dalam Soan (2017) menegaskan bahwa kebijakan pemerintah merupakan landasan utama dalam pembinaan dan pengembangan olahraga karena menjadi pedoman arah bagi pelaksanaan pembangunan keolahragaan yang terencana dan berkelanjutan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan olahraga sangat ditentukan oleh sejauh mana kebijakan pemerintah mampu diimplementasikan secara konsisten dan berpihak pada kebutuhan atlet serta masyarakat.

Peran pemerintah dalam pembangunan olahraga tersebut didukung oleh berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan yang menyatakan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi. Pembinaan tersebut tidak hanya diarahkan pada pencapaian prestasi, tetapi juga mencakup pemberian penghargaan, pembinaan berkelanjutan, serta perhatian terhadap keberlangsungan karier dan kesejahteraan atlet. Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan keolahragaan sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah masing-masing. Desentralisasi kewenangan ini menempatkan pemerintah daerah sebagai aktor penting dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan olahraga yang kontekstual dan responsif Rahanra dan Sarkol (2022).

Sebagai turunan dari regulasi tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan menegaskan peran pemerintah daerah dalam pembinaan olahraga yang meliputi perencanaan program, pembinaan atlet, pengelolaan pendanaan, serta pemberian penghargaan bagi insan olahraga. Ketentuan ini menunjukkan bahwa tanggung jawab pemerintah daerah dalam bidang olahraga tidak hanya terbatas pada penyediaan sarana dan prasarana, tetapi juga mencakup pembinaan atlet secara menyeluruh dan berkelanjutan Prasetyo dkk. (2018). Dengan demikian, kebijakan olahraga daerah idealnya berorientasi pada pembangunan ekosistem olahraga yang mampu menghasilkan atlet berprestasi sekaligus menjamin keberlanjutan pembinaannya.

Di tingkat Kota Bandar Lampung, pengelolaan dan pembinaan olahraga dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) yang memiliki fungsi strategis dalam perumusan dan implementasi kebijakan olahraga daerah. Hal ini diatur dalam Surat Keputusan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 54 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Selain itu,

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan menegaskan kewajiban pemerintah kota dalam mendukung pembinaan olahraga dan atlet berprestasi. Kebijakan tersebut menjadi landasan formal bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembinaan atlet secara terencana dan berkesinambungan.

Dalam praktiknya, pembangunan olahraga daerah tidak hanya diukur dari ketersediaan fasilitas fisik, tetapi juga dari efektivitas kebijakan pembinaan atlet dan dampaknya terhadap keberlanjutan prestasi. Putra (2019) menjelaskan bahwa kualitas sumber daya manusia olahraga menjadi salah satu faktor penting dalam pencapaian prestasi atlet. Sejumlah prestasi atlet asal Kota Bandar Lampung pada berbagai cabang olahraga menunjukkan bahwa daerah ini memiliki potensi sumber daya atlet yang cukup besar.

Penelitian ini secara khusus memfokuskan kajian pada cabang olahraga sepak takraw yang merupakan salah satu cabang olahraga unggulan di Kota Bandar Lampung. Pada ajang Pekan Olahraga Nasional (PON) Tahun 2024, atlet sepak takraw Kota Bandar Lampung berhasil meraih prestasi Juara III, yang menunjukkan adanya potensi pembinaan yang signifikan di tingkat daerah. Prestasi tersebut menjadi indikator penting untuk menilai sejauh mana kebijakan pemerintah daerah berperan dalam mendukung proses pembinaan atlet hingga mampu berkompetisi pada level nasional.

Meskipun cabang olahraga sepak takraw Kota Bandar Lampung telah menunjukkan prestasi yang membanggakan, kondisi tersebut belum sepenuhnya menggambarkan bahwa sistem pembinaan telah berjalan secara ideal sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. Berdasarkan ketentuan dalam peraturan tersebut, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan pembinaan olahraga prestasi secara terencana, berkelanjutan, serta didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Namun, dalam praktiknya pembinaan atlet sepak takraw masih cenderung lebih terfokus menjelang pelaksanaan kejuaraan tertentu,

sementara kebutuhan pendukung latihan sehari-hari masih memerlukan dukungan pendanaan tambahan. Selain itu, perhatian terhadap keberlanjutan karier dan penghargaan bagi atlet berprestasi juga masih memerlukan penguatan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 9 Tahun 2024 dengan implementasi pembinaan atlet sepak takraw di lapangan, sehingga perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai bagaimana kebijakan pemerintah daerah dalam mendukung pembinaan atlet sepak takraw berprestasi di Kota Bandar Lampung.

Namun demikian, keberhasilan tersebut perlu dianalisis lebih lanjut dalam perspektif kebijakan publik, khususnya terkait bentuk dukungan pemerintah daerah dalam aspek pembinaan, pendanaan, koordinasi kelembagaan, serta keberlanjutan program latihan Nazarudin (2022). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menilai capaian prestasi, tetapi juga menganalisis kebijakan yang melatarbelakangi proses pembinaan atlet sepak takraw berprestasi di Kota Bandar Lampung.

Meskipun berbagai kebijakan dan program pembinaan olahraga telah dirumuskan oleh pemerintah daerah, dalam praktiknya masih terdapat sejumlah permasalahan yang mempengaruhi efektivitas pembinaan atlet di tingkat daerah. Pembinaan atlet sering kali masih berorientasi pada pencapaian prestasi jangka pendek, terutama menjelang ajang kompetisi tertentu, sementara aspek keberlanjutan pembinaan belum sepenuhnya terkelola secara sistematis. Dukungan pemerintah daerah terhadap atlet berprestasi umumnya diwujudkan dalam bentuk pemberian bonus atau penghargaan setelah atlet meraih prestasi, namun bentuk dukungan tersebut belum selalu diikuti dengan program pembinaan yang berkelanjutan, jaminan pengembangan karier atlet, maupun perhatian terhadap kesejahteraan atlet dalam jangka panjang Putri dkk. (2024).

Selain itu, koordinasi antara lembaga yang terlibat dalam pembinaan olahraga, seperti Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Komite Olahraga

Nasional Indonesia (KONI), serta organisasi cabang olahraga, masih menghadapi berbagai tantangan dalam hal sinkronisasi program, pengelolaan pendanaan, serta penguatan sistem pembinaan atlet secara berkelanjutan. Menurut Sirait dan Noer (2021) Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan atlet dalam meraih prestasi tidak hanya ditentukan oleh kemampuan individu atlet, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh efektivitas kebijakan pemerintah daerah dalam menciptakan sistem pembinaan yang terencana, terkoordinasi, dan berkelanjutan.

Secara teoritis, analisis kebijakan publik merupakan pendekatan penting untuk menilai efektivitas suatu kebijakan dalam menyelesaikan masalah publik. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa kebijakan olahraga di Indonesia masih cenderung berorientasi pada pencapaian prestasi jangka pendek, sementara aspek keberlanjutan karier dan kesejahteraan atlet belum sepenuhnya menjadi prioritas. Wicaksono (2022) menemukan bahwa banyak atlet berprestasi mengalami kesulitan ekonomi setelah masa aktifnya berakhir. Temuan ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara tujuan normatif kebijakan olahraga dan realitas yang dihadapi atlet di lapangan.

Sebagai dasar dalam memperkuat landasan teoritis dan menemukan posisi penelitian, peneliti melakukan penelaahan terhadap beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik kebijakan keolahragaan dan pembinaan atlet berprestasi. Penelitian-penelitian tersebut dijadikan sebagai bahan perbandingan untuk melihat persamaan, perbedaan, serta celah penelitian yang belum banyak dikaji. Adapun ringkasan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah dalam pembinaan dan peningkatan prestasi atlet disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1. Prestasi Atlet Sepak Takraw Kota Bandar Lampung

No	Nama kejuaraan	Tingkat Kejuaraan	Prestasi	Tahun
1	Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Lampung	Provinsi	Emas Dan Perak	2022

2	UNJ Open tournament	Nasional/Terbuka	Emas Dan Perunggu	2022
3	Pekan Olahraga Nasional	Nasional	Perunggu	2024

Sumber: Diolah Peneliti 2026

Berdasarkan Tabel 1, atlet sepak takraw Kota Bandar Lampung telah menunjukkan prestasi yang cukup baik pada berbagai ajang kompetisi, baik di tingkat daerah maupun nasional. Prestasi yang diraih pada Pekan Olahraga Provinsi Tahun 2022, UNJ Open Tournament Tahun 2022, dan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh–Sumatera Utara Tahun 2024 menunjukkan bahwa cabang olahraga sepak takraw memiliki potensi atlet yang mampu bersaing dan berprestasi. Capaian tersebut menjadi indikator adanya proses pembinaan yang perlu terus didukung dan dikembangkan secara berkelanjutan.

Cabang olahraga sepak takraw dipilih dalam penelitian ini karena mampu menunjukkan prestasi yang konsisten meskipun tidak termasuk cabang olahraga yang memperoleh perhatian sebesar beberapa cabang olahraga populer lainnya. Keberhasilan atlet sepak takraw Kota Bandar Lampung pada berbagai kejuaraan menunjukkan adanya potensi pembinaan yang menarik untuk dikaji, khususnya terkait peran kebijakan pemerintah daerah dalam mendukung atlet berprestasi.

Namun demikian, capaian prestasi tersebut belum sepenuhnya mencerminkan bahwa sistem pembinaan atlet telah berjalan secara optimal. Berdasarkan temuan awal penelitian, masih terdapat berbagai permasalahan, seperti keterbatasan fasilitas latihan, pembinaan yang lebih berfokus menjelang kompetisi, belum konsistennya dukungan pembinaan jangka panjang, serta terbatasnya perhatian terhadap kesejahteraan dan keberlanjutan karier atlet. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan pembinaan olahraga dan pelaksanaannya di lapangan.

Permasalahan tersebut dianalisis melalui pendekatan analisis kebijakan publik untuk menilai bentuk kebijakan, proses implementasi, dan dampaknya terhadap pembinaan atlet berprestasi. Selain itu, penelitian ini juga

menggunakan teori motivasi untuk memahami pengaruh dukungan kebijakan terhadap semangat dan dorongan atlet dalam mencapai serta mempertahankan prestasi. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memandang penting untuk menganalisis kebijakan pemerintah daerah dalam mendukung pembinaan atlet berprestasi di Kota Bandar Lampung, khususnya pada cabang olahraga sepak takraw. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai implementasi kebijakan pembinaan atlet, pengaruhnya terhadap motivasi atlet, serta kontribusinya terhadap keberlanjutan pembinaan atlet berprestasi.

Sebagai dasar dalam memperkuat landasan teoritis dan menemukan posisi penelitian, peneliti melakukan penelaahan terhadap beberapa penelitian terdahulu yang relevan. Penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan perbandingan untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan celah penelitian yang belum banyak dikaji. Adapun ringkasan penelitian terdahulu disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2 . Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul	Hasil Penelitian	Batasan Penelitian
1.	Tampubolon, J., & Harianja, R. (2020)	Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Upaya Peningkatan Prestasi Atlet Sumatera Utara (Studi Kasus: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara)	Kebijakan pemerintah daerah berkontribusi terhadap peningkatan prestasi atlet, namun olahraga belum menjadi prioritas utama pembangunan daerah.	Fokus pada tingkat provinsi dan belum mengkaji konteks kebijakan di tingkat kota.
2.	Raditya, R. S. (2025)	Analisis Kebijakan Pendanaan Pelatihan Olahraga di Tingkat Daerah.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan pendanaan olahraga daerah masih terkendala oleh keterbatasan	Penelitian hanya membahas aspek pendanaan dan tidak menelaah

			alokasi anggaran dan minimnya transparansi pelaporan. Sinergi antar-instansi menjadi kunci efektivitas kebijakan pendanaan pelatihan atlet.	aspek fisik seperti penyediaan sarana dan prasarana olahraga yang mendukung pembinaan atlet.
3.	Rahanra, F., & Sarkol, T. (2022)	Kebijakan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dalam Pembinaan Prestasi Atlet	Kebijakan pembinaan atlet telah ada, tetapi pelaksanaannya belum optimal karena keterbatasan anggaran dan sarana pendukung.	Penelitian terbatas pada satu kabupaten sehingga bersifat kontekstual.
4.	Nazarudin, M. (2022)	Implementasi Kebijakan Pembinaan Atlet Takraw Berprestasi di Provinsi Riau	Implementasi kebijakan pembinaan atlet takraw berjalan, namun belum maksimal akibat kendala koordinasi dan pendanaan.	Fokus pada satu cabang olahraga dan satu wilayah provinsi.
5.	Subhan, E. S., & Adhim, C. (2024)	Analisis Efektivitas Kinerja KONI dalam Meningkatkan Prestasi Cabor di Kabupaten Dompu.	Kinerja KONI berpengaruh terhadap prestasi atlet melalui perencanaan dan pengelolaan program pembinaan.	Penelitian hanya menilai kinerja KONI, belum mengkaji kebijakan pemerintah daerah.

Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2026

Berdasarkan penelaahan terhadap lima penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mendukung pembinaan dan peningkatan prestasi atlet. Penelitian Tampubolon dan Harianja (2020) menunjukkan bahwa kebijakan olahraga di tingkat provinsi mampu berkontribusi terhadap peningkatan prestasi atlet, namun sektor olahraga belum sepenuhnya menjadi prioritas dalam agenda pembangunan daerah sehingga

dukungan kebijakan yang ada masih bersifat parsial dan belum terintegrasi secara optimal.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Raditya (2025) yang menegaskan bahwa efektivitas kebijakan olahraga daerah sangat dipengaruhi oleh pengelolaan pendanaan yang transparan serta sinergi antarinstansi pelaksana kebijakan. Keterbatasan anggaran dan lemahnya transparansi pelaporan menjadi kendala utama dalam pelaksanaan kebijakan pendanaan pelatihan atlet, yang pada akhirnya berdampak pada kurang optimalnya proses pembinaan atlet di daerah. Penelitian Rahanra dan Sarkol (2022) juga menunjukkan bahwa meskipun kebijakan pembinaan prestasi atlet telah dirumuskan di tingkat kabupaten, implementasinya belum berjalan maksimal akibat keterbatasan anggaran dan sarana pendukung.

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang dirumuskan secara normatif dengan realitas pelaksanaan di lapangan. Hal serupa ditemukan dalam penelitian Nazarudin (2022) yang mengungkapkan bahwa pembinaan atlet takraw berprestasi di tingkat provinsi masih menghadapi kendala koordinasi antarinstansi dan keterbatasan pendanaan sehingga belum mampu mendukung pembinaan atlet secara berkelanjutan. Di sisi lain, penelitian Subhan dan Adhim (2024) menyoroti peran strategis KONI dalam meningkatkan prestasi cabang olahraga melalui perencanaan dan pengelolaan program pembinaan. Namun penelitian tersebut belum secara khusus mengkaji keterkaitan antara kinerja KONI dengan kebijakan pemerintah daerah sebagai aktor utama dalam pengambilan keputusan terkait pembinaan olahraga.

Meskipun berbagai penelitian terdahulu telah membahas kebijakan olahraga di tingkat provinsi dan kabupaten, kajian yang secara khusus menganalisis kebijakan pemerintah daerah di tingkat kota dalam mendukung pembinaan atlet berprestasi masih relatif terbatas. Selain itu, sebagian besar penelitian lebih menekankan pada aspek pendanaan, implementasi kebijakan pada cabang olahraga tertentu, atau kinerja lembaga olahraga, tanpa mengkaji secara

komprehensif bagaimana kebijakan tersebut berdampak terhadap keberlanjutan pembinaan atlet berprestasi.

Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan kajian tersebut dengan menganalisis kebijakan pemerintah daerah dalam mendukung pembinaan atlet berprestasi di Kota Bandar Lampung. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian kebijakan publik di bidang keolahragaan serta menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembinaan atlet yang lebih efektif, berkelanjutan, dan mampu mendukung peningkatan prestasi serta kesejahteraan atlet..

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana kebijakan pemerintah daerah dalam mendukung pembinaan atlet sepak takraw berprestasi di Kota Bandar Lampung?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah daerah dalam mendukung pembinaan atlet sepak takraw berprestasi di Kota Bandar Lampung, dengan menelaah bentuk kebijakan yang dirumuskan, proses implementasinya melalui peran Dispora dan KONI Kota Bandar Lampung, serta dukungan yang diberikan dalam aspek perencanaan program, pendanaan, fasilitas latihan, dan penghargaan atlet.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ilmu pemerintahan dan kebijakan publik, khususnya terkait kebijakan keolahragaan di tingkat daerah. Penelitian ini memperkaya pemahaman akademik mengenai bagaimana kebijakan

pemerintah daerah dirumuskan dan diimplementasikan dalam mendukung pembinaan atlet berprestasi. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi konseptual dalam memahami keterkaitan antara kebijakan publik dan pembangunan olahraga daerah yang berkelanjutan. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji kebijakan olahraga maupun implementasi kebijakan publik di tingkat daerah.

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Kota Bandar Lampung, khususnya Dinas Kepemudaan dan Olahraga, sebagai bahan evaluasi dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan pembinaan atlet berprestasi. Penelitian ini juga diharapkan bermanfaat bagi pemangku kepentingan olahraga seperti Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), pelatih, dan organisasi cabang olahraga dalam mengembangkan program pembinaan atlet yang lebih terarah dan berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai bentuk dukungan kebijakan pemerintah terhadap atlet berprestasi serta menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti dalam pengembangan kajian kebijakan publik di bidang keolahragaan

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Analisis Kebijakan

2.1.1 Definisi Analisis Kebijakan

Analisis kebijakan dipahami sebagai suatu proses untuk mensintesis berbagai informasi, termasuk temuan-temuan penelitian, guna menghasilkan rekomendasi mengenai alternatif desain kebijakan publik. Kebijakan publik sendiri merupakan keputusan atau tindakan pemerintah yang memengaruhi perilaku individu maupun kelompok dalam masyarakat. Berdasarkan pemahaman tersebut, sejumlah karakteristik mendasar dari analisis kebijakan dapat dirumuskan.

Menurut William Dunn (dalam Fatmariyanti., 2023) analisis kebijakan merupakan bentuk analisis yang dirancang untuk menghasilkan dan menyajikan informasi secara sistematis sehingga dapat menjadi dasar pertimbangan bagi para pembuat kebijakan dalam mengambil keputusan. Istilah analisis dalam konteks ini dipahami secara luas, mencakup penggunaan intuisi, pandangan profesional, serta proses menguraikan kebijakan ke dalam sejumlah komponen untuk diuji, sekaligus merancang dan menyintesis berbagai alternatif kebijakan baru. Sementara itu, William N. Dunn (dalam Fatmariyanti., 2023) mendefinisikan analisis kebijakan sebagai disiplin ilmu sosial terapan yang memanfaatkan beragam metode penelitian dan argumen guna menghasilkan serta menyebarkan informasi yang relevan bagi kebutuhan kebijakan, sehingga dapat digunakan dalam proses politik untuk memecahkan persoalan publik. Berdasarkan pandangan para ahli tersebut, analisis kebijakan dapat dipahami sebagai suatu kegiatan intelektual yang berfungsi menciptakan pengetahuan mengenai masalah publik sekaligus mendukung proses

perumusan kebijakan. Suatu kebijakan lahir melalui rangkaian aktivitas yang dilakukan oleh para aktor dalam proses kebijakan publik. Proses ini merupakan kegiatan analitis yang berlangsung dalam konteks politik. Menurut William N. Dunn, terdapat lima tahap utama dalam proses kebijakan publik, yaitu:

1. Perumusan Masalah

Tahap ini berfokus pada pengumpulan informasi untuk mengidentifikasi kondisi-kondisi yang dianggap menjadi sumber masalah.

2. Peramalan (*Forecasting*)

Tahap ini berfungsi memberikan gambaran mengenai dampak yang mungkin terjadi di masa depan dari setiap alternatif kebijakan, termasuk apabila tidak ada kebijakan yang diambil.

3. Rekomendasi Kebijakan

Pada tahap ini dianalisis manfaat bersih dari tiap alternatif kebijakan, lalu dipilih alternatif yang dinilai memberikan keuntungan terbesar.

4. Monitoring Kebijakan

Tahap ini menyediakan informasi tentang dampak kebijakan yang sedang atau telah diterapkan, termasuk hambatan-hambatan yang muncul.

5. Evaluasi Kebijakan

Tahap ini menilai kinerja serta hasil akhir dari kebijakan yang dijalankan.

Salah satu karakteristik penting dari analisis kebijakan ialah sifatnya yang menekankan sintesis informasi. Proses ini mencakup kegiatan memadukan berbagai data, bukti empiris, serta hasil penelitian untuk menghasilkan kesimpulan yang koheren dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, fokus utama analisis kebijakan terletak pada proses penyusunan kebijakan serta perangkat instrumen yang menyertainya. Aktivitas analitis di dalamnya menuntut adanya pengumpulan informasi secara sistematis dan penarikan inferensi yang logis berdasarkan prinsip-prinsip ilmiah.

Selain itu, hasil penelitian berperan sebagai salah satu sumber informasi yang penting dalam analisis kebijakan. Temuan-temuan empiris dari penelitian bukan hanya menjadi dasar argumentasi, tetapi juga berfungsi sebagai bahan untuk mengembangkan rekomendasi yang lebih akurat dan relevan. Hal ini menunjukkan

bahwa analisis kebijakan pada dasarnya merupakan kelanjutan dari penelitian, di mana bukti ilmiah didiseminasikan dan diterjemahkan ke dalam bentuk yang lebih aplikatif bagi kebutuhan para pengambil keputusan.

Karakteristik lainnya tampak pada keluaran analisis kebijakan yang berupa rekomendasi mengenai pilihan keputusan atau rancangan kebijakan publik. Rekomendasi ini harus disusun secara ringkas, jelas, komprehensif, dan tepat sasaran agar dapat digunakan secara langsung oleh para pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan. Kemampuan untuk merumuskan nasihat operasional yang dapat diterapkan merupakan ciri penting yang membedakan analisis kebijakan dari bentuk kajian akademik lainnya.

Analisis kebijakan juga memiliki kedekatan yang erat dengan para pengambil keputusan publik. Klien utama analisis ini meliputi lembaga eksekutif, legislatif, maupun kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan terhadap suatu isu kebijakan. Karakteristik klien yang spesifik tersebut membuat analisis kebijakan bersifat responsif terhadap kebutuhan mereka. Karena itu, praktik analisis kebijakan selalu berorientasi pada klien (*client oriented*), yakni menghasilkan rekomendasi yang benar-benar dibutuhkan dan dapat dimanfaatkan secara langsung. Dengan demikian, keberadaan permintaan atau kebutuhan jelas dari klien menjadi pendorong utama dilakukannya analisis kebijakan, sehingga produk analisis benar-benar relevan dengan konteks perumusan kebijakan yang sedang dihadapi.

Dalam kaitannya dengan orientasi praktis tersebut, William Dunn yang menegaskan bahwa analisis kebijakan merupakan disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan metode inkuiri serta argumentasi majemuk dalam menghasilkan dan mendayagunakan informasi kebijakan. Informasi ini kemudian digunakan untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang pada dasarnya bersifat politis, sehingga analisis kebijakan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam penyelesaian berbagai persoalan public. Dengan demikian, analisis kebijakan bukan hanya berorientasi pada rasionalitas teknokratis, tetapi juga mencakup pemahaman mendasar yang membantu aktor kebijakan merumuskan solusi yang lebih pragmatis.

Dalam kerangka tersebut, Dunn mengemukakan tiga model analisis kebijakan, yakni prospektif, retrospektif, dan integratif. Model prospektif dilakukan sebelum kebijakan diimplementasikan, sehingga lebih bersifat prediktif atau berorientasi pada peramalan (*forecasting*) terhadap kemungkinan dampak suatu kebijakan. Sebaliknya, model retrospektif dilakukan setelah kebijakan dijalankan, dengan fokus utama pada evaluasi terhadap kinerja, efektivitas, serta implikasi pelaksanaannya. Sementara itu, model integratif memadukan kedua pendekatan tersebut dan dipandang sebagai model yang paling komprehensif, karena menganalisis konsekuensi kebijakan baik pada tahap pra-implementasi maupun pasca-implementasi melalui penggunaan teknik peramalan dan evaluasi secara simultan.

Pemahaman mengenai model-model ini menunjukkan bahwa analisis kebijakan harus adaptif terhadap dinamika kontekstual. Sebagai contoh, dalam sektor pendidikan, berbagai kebijakan seperti kurikulum madrasah menghadapi tantangan kompleks seiring perubahan sosial dan perkembangan zaman. Tanpa adanya reformulasi dan pembaruan yang relevan, lembaga pendidikan tersebut berpotensi mengalami ketertinggalan dan kehilangan minat masyarakat. Oleh sebab itu, analisis kebijakan memiliki peran strategis dalam merancang intervensi yang responsif terhadap kebutuhan dan perkembangan lingkungan eksternal.

Pandangan tersebut sejalan dengan pemikiran Solihin Abdul Wahab yang melihat analisis kebijakan sebagai proses penelaahan kritis dan sistematis terhadap isu-isu kebijakan dengan menggunakan beragam metode ilmiah. Bagi Wahab, analisis kebijakan bertujuan menghasilkan rekomendasi yang dapat membantu pembuat kebijakan serta pihak yang terdampak dalam menentukan alternatif penyelesaian yang paling sesuai dengan persoalan yang dihadapi. Dengan demikian, analisis kebijakan tidak hanya memperhatikan aspek teknis dari kebijakan, tetapi juga mempertimbangkan dinamika sosial, politik, serta konfigurasi kepentingan para pemangku kepentingan.

Melalui pendekatan yang demikian, analisis kebijakan berfungsi sebagai jembatan antara kepentingan perumus kebijakan dan kebutuhan masyarakat

yang terdampak. Integrasi kepentingan ini menjadi penting agar kebijakan yang dihasilkan lebih responsif, inklusif, serta kontekstual terhadap realitas permasalahan. Dengan kata lain, analisis kebijakan memainkan peran krusial dalam memastikan bahwa kebijakan publik tidak hanya layak secara teknokratis, tetapi juga relevan secara sosial dan politis bagi kelompok sasaran.

2.2 Tinjauan Kebijakan Publik

2.2.1 Definisi Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatur kehidupan masyarakat dan menyelesaikan permasalahan publik. Karakteristik kebijakan publik meliputi: (1) adanya tujuan yang jelas untuk memecahkan masalah publik; (2) dilaksanakan oleh aktor atau lembaga pemerintahan; (3) dapat bersifat positif (melakukan tindakan tertentu) maupun negatif (memutuskan untuk tidak bertindak); serta (4) memiliki dasar hukum yang mengikat. Dengan demikian, kebijakan publik tidak hanya berupa dokumen formal, tetapi juga mencakup proses, tindakan, dan hasil yang memengaruhi kehidupan masyarakat.

Kebijakan publik tersusun dari dua istilah, yakni kebijakan dan publik. Menurut Anderson (dalam Rodiyah, dkk 2022), kebijakan merupakan suatu tindakan yang memiliki tujuan tertentu dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor dalam rangka menangani persoalan yang menjadi perhatian. Sementara itu, publik mengandung makna aktivitas manusia yang dianggap perlu diatur atau diintervensi oleh pemerintah, aturan sosial, atau paling tidak oleh tindakan kolektif. Dengan demikian, dapat dirumuskan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang dirancang untuk mengatasi persoalan penting di masyarakat dan umumnya melibatkan peran pemerintah, aturan sosial, maupun kerja sama bersama.

Lebih lanjut, Dye (2005) dalam Rodiyah, dkk (2022) mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang pemerintah memilih untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Definisi ini menekankan bahwa pemerintah memiliki kewenangan untuk menentukan melakukan atau tidak melakukan sesuatu, yang

keduanya sama-sama dapat dikategorikan sebagai kebijakan. Apabila pemerintah memilih untuk tidak bertindak, keputusan tersebut juga dianggap sebagai kebijakan karena didasari alasan tertentu. Sebaliknya, jika pemerintah memutuskan melaksanakan suatu kebijakan, maka pertimbangan utamanya adalah bahwa kebijakan tersebut mendatangkan manfaat lebih besar bagi kehidupan bersama serta tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Hal ini menjadi dasar penting dalam pemilihan kebijakan publik untuk dijalankan. Banyak ahli memberikan definisi mengenai kebijakan publik, dengan karakteristik dan sudut pandang yang berbeda-beda. Namun demikian, dapat dipermudah pemahamannya bahwa kebijakan publik adalah keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mewujudkan tujuan yang telah direncanakan demi perubahan yang diharapkan.

Kebijakan publik di bidang keolahragaan merupakan bagian dari kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan aktivitas olahraga, baik dalam aspek kesehatan, pendidikan, maupun prestasi. Dalam konteks pembangunan daerah, olahraga tidak hanya dipahami sebagai kegiatan fisik, tetapi juga sebagai sarana strategis dalam membentuk karakter, meningkatkan daya saing, serta mendorong pencapaian prestasi atlet yang dapat mengharumkan nama daerah.

Dalam kerangka kebijakan publik, penyelenggaraan keolahragaan di daerah tidak hanya mengacu pada regulasi nasional, tetapi juga diatur secara lebih spesifik melalui kebijakan daerah yang disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan wilayah masing-masing. Di Kota Bandar Lampung, kebijakan di bidang keolahragaan diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, yang menjadi landasan hukum utama dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga di tingkat daerah. Peraturan daerah ini menegaskan bahwa pemerintah kota memiliki tanggung jawab dalam menyelenggarakan pembinaan olahraga secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, dalam peraturan daerah tersebut dijelaskan bahwa penyelenggaraan keolahragaan merupakan bagian dari sistem pembangunan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui olahraga. Olahraga tidak

hanya dipandang sebagai aktivitas fisik semata, tetapi juga sebagai kebutuhan hidup yang berperan dalam membentuk kesehatan jasmani dan rohani, sebagaimana tercermin dalam prinsip *mens sana in corpore sano*. Selain itu, olahraga juga berkembang sebagai gaya hidup masyarakat yang memiliki dampak positif terhadap kesejahteraan dan produktivitas.

Peraturan daerah ini juga menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan olahraga dapat dilihat dari capaian prestasi atlet dalam berbagai ajang kejuaraan, yang menjadi indikator keberhasilan daerah dalam bidang keolahragaan. Oleh karena itu, pembinaan atlet menjadi aspek penting yang harus dikelola secara optimal agar mampu menghasilkan atlet berprestasi yang dapat mengharumkan nama daerah. Dalam hal ini, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mengatur dan mengoordinasikan berbagai unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan olahraga, termasuk organisasi olahraga, pelaku olahraga, serta partisipasi masyarakat.

Selain itu, Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 9 Tahun 2024 juga memberikan kepastian hukum bagi perangkat daerah dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga, termasuk dalam aspek penyediaan sarana dan prasarana, pengelolaan pendanaan, serta dukungan terhadap kegiatan olahraga. Kebijakan ini juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam mewujudkan masyarakat yang aktif, sehat, bugar, serta berprestasi dalam bidang olahraga.

Lebih lanjut, dalam Peraturan Daerah tersebut dijelaskan bahwa pembinaan olahraga prestasi meliputi berbagai aspek penting, seperti perencanaan program pembinaan, penyediaan dan pengelolaan pendanaan, penyediaan sarana dan prasarana olahraga, serta pemberian penghargaan kepada atlet berprestasi. Selain itu, pelaksanaan kebijakan keolahragaan juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagai pelaksana kebijakan pemerintah daerah, serta Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) sebagai mitra strategis dalam pembinaan cabang olahraga.

Meskipun secara normatif kebijakan tersebut telah mengatur secara komprehensif mengenai pembinaan olahraga, dalam praktiknya implementasi kebijakan di bidang

keolahragaan masih menghadapi berbagai tantangan. Permasalahan seperti keterbatasan anggaran di olahraga sepak takraw, belum optimalnya penyediaan fasilitas latihan, serta kurangnya keberlanjutan program pembinaan atlet menjadi faktor yang dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan. Selain itu, koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam pembinaan olahraga juga menjadi aspek penting yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan di tingkat daerah.

Dalam konteks penelitian ini, kebijakan publik di bidang keolahragaan difokuskan pada implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pembinaan atlet sepak takraw berprestasi di Kota Bandar Lampung. Kebijakan tersebut tidak hanya dipahami sebagai dokumen formal yang tertuang dalam peraturan daerah, tetapi juga sebagai proses pelaksanaan yang melibatkan komunikasi kebijakan, ketersediaan sumber daya, komitmen pelaksana, serta struktur birokrasi sebagaimana dijelaskan dalam model implementasi kebijakan. Dengan demikian, kajian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana kebijakan yang telah dirumuskan dalam Peraturan Daerah dapat diimplementasikan secara efektif dalam mendukung peningkatan dan keberlanjutan prestasi atlet sepak takraw di Kota Bandar Lampung

2.2.2 Proses Pembuatan Kebijakan

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan rangkaian tahapan yang sistematis dan saling berkaitan dalam upaya merumuskan serta menyelesaikan permasalahan publik. Menurut Dunn (dalam Fatmariyanti, 2023), keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas perumusannya, tetapi juga oleh proses yang meliputi pengkajian kebijakan, pembuatan kebijakan, serta komunikasi kebijakan yang berlangsung secara terpadu.

Pertama, proses pengkajian kebijakan merupakan tahap awal yang berfokus pada penyediaan metodologi analisis kebijakan. Tahap ini mencakup penggunaan seperangkat standar, aturan, serta prosedur yang digunakan untuk menghasilkan dan menilai secara kritis berbagai informasi yang relevan dengan permasalahan kebijakan. Pengkajian kebijakan bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan

yang dirumuskan didasarkan pada data, fakta, serta analisis yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Kedua, proses pembuatan kebijakan merupakan rangkaian tahapan yang meliputi penyusunan agenda kebijakan, perumusan kebijakan, pengambilan atau adopsi keputusan, pelaksanaan kebijakan, hingga evaluasi kebijakan. Tahapan ini menunjukkan bahwa kebijakan publik tidak hanya berhenti pada tahap perencanaan, tetapi juga mencakup implementasi dan penilaian terhadap hasil kebijakan yang telah dijalankan. Setiap tahapan memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Ketiga, proses komunikasi kebijakan merupakan upaya untuk menyampaikan dan menyebarluaskan kebijakan kepada para pemangku kepentingan, sekaligus sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas kebijakan melalui pertukaran informasi dan evaluasi secara kritis. Komunikasi kebijakan yang efektif akan mempermudah pemahaman serta pelaksanaan kebijakan oleh para aktor yang terlibat, sehingga tujuan kebijakan dapat tercapai secara optimal.

Berdasarkan tahapan tersebut, dapat dipahami bahwa proses kebijakan publik merupakan suatu siklus yang tidak terpisahkan antara perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan. Dalam konteks penelitian ini, proses kebijakan merujuk pada kebijakan pemerintah daerah di bidang keolahragaan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. Penelitian ini tidak mengkaji seluruh tahapan proses kebijakan secara menyeluruh, melainkan lebih difokuskan pada tahap implementasi kebijakan, yaitu bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan oleh instansi terkait seperti Dinas Kepemudaan dan Olahraga serta KONI dalam pembinaan atlet sepak takraw berprestasi di Kota Bandar Lampung. Dengan demikian, pemahaman mengenai proses pembuatan kebijakan menjadi landasan penting untuk menganalisis efektivitas implementasi kebijakan dalam mencapai tujuan pembinaan atlet secara berkelanjutan.

Meskipun proses kebijakan mencakup berbagai tahapan sebagaimana dikemukakan oleh Dunn, penelitian ini tidak mengkaji seluruh tahapan tersebut, melainkan

difokuskan pada tahap implementasi kebijakan. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan sebagai landasan utama dalam menganalisis pelaksanaan kebijakan pembinaan atlet sepak takraw di Kota Bandar Lampung.

2.2.3 Analisis Kebijakan Publik

Analisis kebijakan publik pada dasarnya berangkat dari kesadaran para pelaku kebijakan terhadap adanya suatu permasalahan yang membutuhkan penanganan melalui kebijakan yang tepat. Proses ini muncul ketika terdapat kondisi yang menimbulkan kesulitan, ketidaksesuaian, atau kekecewaan dalam pemenuhan kebutuhan, nilai, maupun kesempatan di masyarakat. Ackoff dalam Dunn (2000:121) menjelaskan bahwa kesadaran terhadap masalah tersebut menjadi titik awal dari lahirnya suatu proses kebijakan baru yang bersifat sistematis dan terarah.

Selanjutnya, Dunn (2000:21) sebagaimana dikutip dalam Meutia (2013), menyatakan bahwa metodologi analisis kebijakan pada dasarnya mengintegrasikan lima prosedur umum yang lazim digunakan dalam pemecahan masalah manusia, yaitu definisi, prediksi, preskripsi, deskripsi, dan evaluasi. Dalam konteks analisis kebijakan publik, kelima prosedur tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Perumusan Masalah (*Problem Formulation*)

Perumusan masalah merupakan tahap awal dalam analisis kebijakan yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan kondisi yang menimbulkan masalah kebijakan. Pada tahap ini, permasalahan dirumuskan secara jelas agar dapat diketahui akar masalah, ruang lingkup, serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Kejelasan perumusan masalah menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan yang akan diambil.

2. Peramalan (*Forecasting*)

Peramalan merupakan proses analisis untuk memperkirakan konsekuensi yang mungkin terjadi di masa mendatang apabila suatu alternatif kebijakan diterapkan atau tidak diterapkan. Tahap ini memberikan gambaran mengenai dampak potensial dari berbagai pilihan kebijakan, sehingga membantu pengambil keputusan dalam memahami risiko dan peluang yang akan muncul.

3. Rekomendasi (*Recommendation*)

Rekomendasi merupakan tahap penyusunan alternatif kebijakan yang dianggap paling layak untuk dipilih berdasarkan hasil analisis sebelumnya. Pada tahap ini, diberikan informasi mengenai nilai dan kegunaan relatif dari setiap alternatif solusi, sehingga dapat menjadi dasar dalam proses pengambilan keputusan kebijakan.

4. Pemantauan (*Monitoring*)

Pemantauan merupakan proses pengumpulan informasi mengenai pelaksanaan kebijakan yang sedang berjalan maupun yang telah dilaksanakan. Tahap ini menggambarkan kondisi aktual di lapangan, termasuk bagaimana kebijakan diimplementasikan serta dampak awal yang ditimbulkan dari pelaksanaannya.

5. Evaluasi (*Evaluation*)

Evaluasi merupakan tahap akhir dalam prosedur analisis kebijakan yang bertujuan untuk menilai nilai, manfaat, serta efektivitas kebijakan yang telah diterapkan dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Evaluasi memberikan informasi apakah kebijakan telah mencapai tujuan yang diharapkan atau memerlukan perbaikan lebih lanjut.

Indikator yang digunakan dalam penelitian ini disusun berdasarkan pertimbangan relevansi teoritis dan kesesuaian empiris dengan fokus penelitian. Pemilihan indikator ini didasarkan pada argumentasi bahwa setiap tahapan dalam prosedur analisis kebijakan menurut Dunn (William N. Dunn), yang meliputi perumusan masalah, peramalan, rekomendasi, pemantauan, dan evaluasi, secara langsung merepresentasikan dimensi analisis kebijakan dalam konteks pembinaan atlet sepak takraw di Kota Bandar Lampung. Selain itu, pembatasan indikator dilakukan untuk menjaga ketajaman analisis agar tidak melebar, sehingga pembahasan dapat dilakukan secara lebih mendalam, terarah, dan sesuai dengan konteks penelitian.

Adapun indikator dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perumusan Masalah (*Problem Formulation*)
 - a) Masalah pembinaan atlet
 - b) Kebutuhan atlet
 - c) Data pembinaan olahraga
2. Peramalan (*Forecasting*)
 - a) Prediksi prestasi atlet
 - b) Dampak pembinaan
 - c) Keberlanjutan program
3. Rekomendasi (*Recommendation*)
 - a) Program pembinaan
 - b) Kesesuaian kebijakan
 - c) Dukungan pembinaan
4. Pemantauan (*Monitoring*)
 - a) Pelaksanaan pembinaan
 - b) Sarana dan prasarana
 - c) Keterlibatan stakeholder
5. Evaluasi (*Evaluation*)
 - a) Prestasi atlet
 - b) Efektivitas pembinaan
 - c) Dampak pembinaan olahraga daerah

2.3 Tinjauan Motivasi

2.3.1 Pengertian Motivasi

Motivasi berasal dari bahasa Latin *movere* yang berarti dorongan atau penggerak. Dalam konteks organisasi, motivasi kerja merupakan kekuatan yang mendorong individu untuk bekerja secara optimal dengan mengerahkan kemampuan dan usahanya guna mencapai tujuan organisasi. Motivasi berperan penting karena dapat meningkatkan semangat kerja, produktivitas, serta tanggung jawab individu terhadap tugas yang diberikan. Individu yang memiliki motivasi kerja tinggi cenderung menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan individu yang memiliki motivasi rendah.

Bertujuan untuk meningkatkan gairah dan kepuasan kerja, produktivitas, kedisiplinan, loyalitas, serta tanggung jawab karyawan terhadap pekerjaannya. Motivasi juga berfungsi menciptakan hubungan kerja yang harmonis serta mendorong individu agar bekerja secara efektif dan efisien dalam organisasi. Dengan demikian, motivasi menjadi faktor penting dalam mendorong individu untuk mencapai kinerja yang optimal.

Hasibuan (2010) menyatakan bahwa motivasi berkaitan erat dengan kebutuhan individu. Kebutuhan merupakan kondisi kekurangan yang dirasakan seseorang dan mendorong munculnya perilaku untuk memenuhinya. Ketika kebutuhan tersebut belum terpenuhi, individu akan terdorong untuk melakukan berbagai upaya agar kebutuhan tersebut dapat tercapai. Oleh karena itu, kebutuhan menjadi dasar munculnya motivasi dalam diri seseorang. Dalam penelitian ini, teori motivasi digunakan sebagai salah satu pendekatan untuk memahami bagaimana kebijakan pemerintah daerah dapat memengaruhi semangat dan dorongan atlet dalam mencapai prestasi.

2.3.2 Teori Motivasi

Salah satu teori kebutuhan yang banyak digunakan dalam kajian motivasi kerja adalah teori kebutuhan yang dikemukakan oleh McClelland. Menurut McClelland (dalam Hasibuan, 2010), terdapat tiga kebutuhan utama yang mempengaruhi perilaku kerja individu, yaitu kebutuhan berprestasi (*need for achievement*), kebutuhan kekuasaan (*need for power*), dan kebutuhan afiliasi (*need for affiliation*). Kebutuhan yang paling dominan pada diri individu akan mempengaruhi sikap dan perilakunya dalam bekerja.

1. Kebutuhan Berprestasi (*Need for Achievement*)

Kebutuhan berprestasi merupakan dorongan dalam diri individu untuk mencapai standar kinerja yang tinggi serta memperoleh keberhasilan dalam pekerjaan. Individu dengan kebutuhan berprestasi tinggi cenderung menetapkan tujuan yang menantang namun realistis, berorientasi pada hasil, serta berusaha mencapai prestasi terbaik dalam pekerjaannya. Mereka juga menginginkan umpan balik sebagai bentuk evaluasi terhadap hasil kerja yang

telah dicapai. Dengan demikian, kebutuhan berprestasi mendorong individu untuk bekerja lebih giat dan meningkatkan kualitas kinerjanya.

Indikator kebutuhan berprestasi dalam penelitian ini meliputi: (1) dorongan untuk mencapai target kerja; (2) rasa senang terhadap pencapaian target; (3) keinginan meningkatkan kemampuan dalam pekerjaan; (4) penetapan tujuan kerja yang realistis; dan (5) kepuasan setelah menyelesaikan tugas yang menantang.

2. Kebutuhan Kekuasaan (*Need for Power*)

Kebutuhan kekuasaan merupakan dorongan individu untuk mempengaruhi, mengendalikan, dan mengarahkan perilaku orang lain serta memperoleh posisi yang memiliki otoritas dalam organisasi. Individu dengan kebutuhan kekuasaan tinggi cenderung menyukai tanggung jawab, peran kepemimpinan, serta kesempatan untuk mempengaruhi orang lain dalam pekerjaan. Kebutuhan ini berkaitan dengan keinginan individu untuk memiliki pengaruh dan kontrol terhadap lingkungan kerjanya (McClelland dalam Hasibuan, 2010).

Indikator kebutuhan kekuasaan dalam penelitian ini meliputi: (1) dorongan menerima tanggung jawab; (2) keinginan mempengaruhi orang lain; (3) keberanian menyampaikan pendapat; (4) keinginan mencapai posisi lebih tinggi; dan (5) kesenangan terhadap persaingan dan keberhasilan.

3. Kebutuhan Afiliasi (*Need for Affiliation*)

Kebutuhan afiliasi merupakan dorongan individu untuk menjalin hubungan sosial yang harmonis, akrab, dan penuh kerja sama dengan orang lain. Individu dengan kebutuhan afiliasi tinggi memiliki keinginan untuk diterima dalam kelompok, membangun hubungan yang baik dengan rekan kerja, serta bekerja sama dalam menyelesaikan tugas. Hubungan sosial yang positif dapat meningkatkan kenyamanan kerja dan semangat individu dalam organisasi (McClelland dalam Hasibuan, 2010).

Indikator kebutuhan afiliasi dalam penelitian ini meliputi: (1) keinginan untuk disukai; (2) kecenderungan membangun hubungan erat dengan rekan kerja; (3) rasa senang menjadi bagian dari kelompok; dan (4) keinginan bekerja sama dengan orang lain.

Berdasarkan teori tersebut, indikator yang digunakan dalam penelitian ini disusun berdasarkan pertimbangan relevansi teoritis dan kesesuaian empiris dengan fokus penelitian. Pemilihan indikator ini didasarkan pada argumentasi bahwa ketiga kebutuhan utama menurut McClelland secara langsung merepresentasikan dimensi motivasi individu dalam konteks pembinaan atlet sepak takraw di Kota Bandar Lampung, khususnya dalam melihat dorongan berprestasi, dorongan mempengaruhi dalam tim, serta kemampuan menjalin kerja sama antar atlet. Selain itu, pembatasan indikator dilakukan untuk menjaga ketajaman analisis agar tidak melebar, sehingga pembahasan dapat dilakukan secara lebih mendalam, terarah, dan sesuai dengan konteks penelitian.

Adapun indikator dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kebutuhan Berprestasi (*Need for Achievement*), Kebutuhan berprestasi merupakan dorongan individu untuk mencapai standar kinerja yang tinggi serta memperoleh keberhasilan dalam bidang yang dijalani. Individu dengan kebutuhan berprestasi tinggi cenderung memiliki semangat untuk mencapai target serta terus meningkatkan kemampuan yang dimiliki. Indikator kebutuhan berprestasi dalam penelitian ini meliputi:

- a) Pencapaian target prestasi
- b) Peningkatan kemampuan latihan
- c) Kepuasan terhadap prestasi

2. Kebutuhan Kekuasaan (*Need for Power*), Kebutuhan kekuasaan merupakan dorongan individu untuk mempengaruhi orang lain serta memiliki peran penting dalam suatu kelompok. Dalam konteks olahraga, kebutuhan ini dapat terlihat dari keinginan atlet untuk menunjukkan kemampuan terbaik dan memiliki pengaruh dalam tim. Indikator kebutuhan kekuasaan dalam penelitian ini meliputi:

- a) Mempengaruhi rekan tim
- b) Menerima tanggung jawab
- c) Mencapai posisi atau prestasi lebih tinggi

3. Kebutuhan Afiliasi (*Need for Affiliation*), Kebutuhan afiliasi merupakan dorongan individu untuk menjalin hubungan sosial yang baik dengan orang lain. Individu dengan kebutuhan afiliasi tinggi cenderung menyukai kerja sama serta

merasa nyaman menjadi bagian dari suatu kelompok. Indikator kebutuhan afiliasi dalam penelitian ini meliputi:

- a) Diterima dalam kelompok
- b) Hubungan baik dengan rekan tim
- c) Kerja sama dalam tim

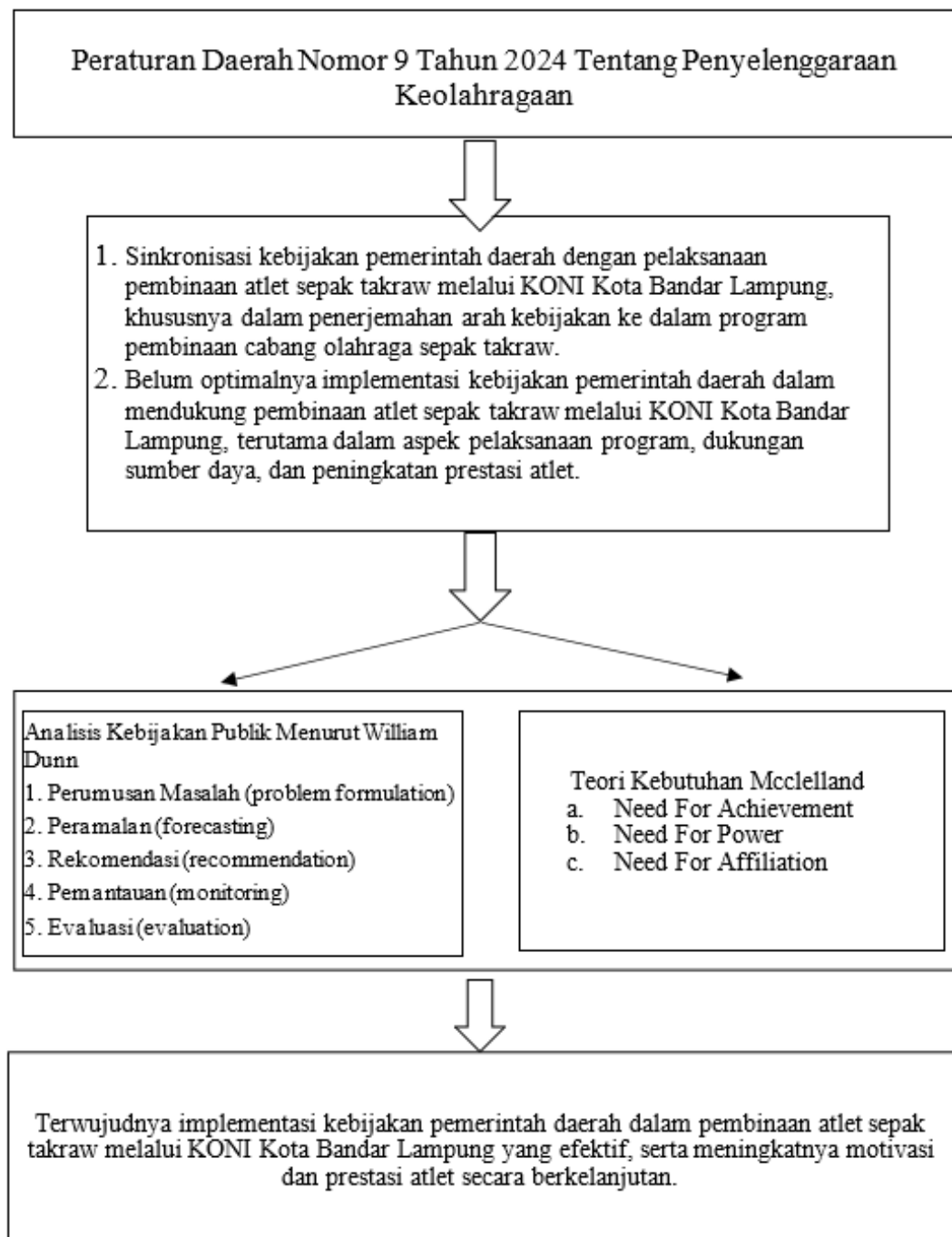
2.4 Kerangka Pikir

Kerangka pikir dalam penelitian ini disusun untuk menggambarkan alur berpikir peneliti dalam menganalisis kebijakan pemerintah daerah dalam pembinaan atlet sepak takraw di Kota Bandar Lampung. Kerangka ini diawali dari landasan regulasi, yaitu Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, yang menjadi dasar arah kebijakan pembinaan olahraga di daerah.

Berdasarkan regulasi tersebut, ditemukan dua kondisi utama, yaitu adanya sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan pelaksanaan pembinaan atlet sepak takraw melalui KONI Kota Bandar Lampung dalam penerjemahan arah kebijakan ke dalam program pembinaan, serta masih belum optimalnya implementasi kebijakan dalam mendukung pembinaan atlet, khususnya terkait pelaksanaan program, dukungan sumber daya, dan peningkatan prestasi atlet.

Kondisi tersebut kemudian dianalisis menggunakan pendekatan Analisis Kebijakan Publik menurut William N. Dunn, yang meliputi tahapan perumusan masalah, peramalan, rekomendasi, pemantauan, dan evaluasi. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan Teori Kebutuhan McClelland yang meliputi kebutuhan berprestasi, kebutuhan kekuasaan, dan kebutuhan afiliasi untuk melihat aspek motivasi atlet dalam proses pembinaan.

Melalui integrasi kedua pendekatan tersebut, penelitian ini menganalisis bagaimana kebijakan pembinaan atlet sepak takraw diimplementasikan oleh pemerintah daerah melalui KONI Kota Bandar Lampung, serta bagaimana kebijakan tersebut berdampak terhadap motivasi dan prestasi atlet. Pada akhirnya, diharapkan terwujud implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pembinaan atlet sepak takraw yang efektif, serta peningkatan motivasi dan prestasi atlet secara berkelanjutan di Kota Bandar Lampung.



Gambar 1. Kerangka Pikir
Sumber : Diolah Peneliti, 2026

III.METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, karena bertujuan untuk menggambarkan, memahami, dan menganalisis secara mendalam kebijakan pemerintah daerah dalam pembinaan atlet berprestasi, khususnya pada pelaksanaan pembinaan yang dijalankan oleh KONI Kota Bandar Lampung melalui cabang olahraga (cabor) sebagai pelaksana pembinaan prestasi. Pendekatan kualitatif deskriptif dipilih karena penelitian ini tidak berorientasi pada pengukuran kuantitatif, melainkan pada pemahaman terhadap proses kebijakan, dinamika kelembagaan, serta praktik pembinaan atlet sebagaimana berlangsung di lapangan.

Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya menelusuri secara komprehensif bagaimana kebijakan pembinaan atlet berprestasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah diterapkan dalam pelaksanaan pembinaan olahraga prestasi di Kota Bandar Lampung. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti menggali secara mendalam mekanisme pembinaan atlet, bentuk dukungan pemerintah daerah, peran KONI dan cabang olahraga, serta pengalaman atlet dalam menjalani proses pembinaan dan kompetisi.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan perspektif analisis kebijakan publik menurut William N. Dunn sebagai kerangka analisis utama. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah kebijakan pembinaan atlet berprestasi melalui beberapa tahapan analisis kebijakan, yaitu perumusan masalah (problem formulation), peramalan (forecasting), rekomendasi (recommendation), pemantauan (monitoring), dan evaluasi (evaluation). Melalui pendekatan tersebut, penelitian

diarahkan untuk menganalisis bagaimana kebijakan pembinaan olahraga dirumuskan, bagaimana pelaksanaannya di lapangan, serta bagaimana dampak dan kendala yang muncul dalam proses pembinaan atlet sepak takraw berprestasi di Kota Bandar Lampung.

Pada aspek perumusan masalah, penelitian difokuskan pada identifikasi berbagai persoalan yang dihadapi dalam pembinaan atlet sepak takraw, seperti keterbatasan anggaran, fasilitas latihan, konsistensi pembinaan, serta dukungan terhadap kesejahteraan atlet. Selanjutnya, aspek peramalan digunakan untuk melihat kemungkinan dampak dari pelaksanaan kebijakan pembinaan olahraga terhadap peningkatan prestasi atlet maupun keberlanjutan sistem pembinaan olahraga daerah.

Aspek rekomendasi dalam penelitian ini diarahkan pada upaya memberikan masukan terhadap penguatan kebijakan pembinaan atlet berprestasi agar lebih terstruktur dan berkelanjutan. Sementara itu, aspek pemantauan digunakan untuk melihat bagaimana pelaksanaan kebijakan pembinaan dilakukan oleh pemerintah daerah, Dispora, KONI, dan cabang olahraga dalam praktik pembinaan sehari-hari. Adapun aspek evaluasi digunakan untuk menilai sejauh mana kebijakan pembinaan atlet telah berjalan sesuai dengan tujuan pembinaan olahraga prestasi di daerah.

Pendekatan analisis kebijakan publik menurut William N. Dunn dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara kebijakan pemerintah daerah dengan implementasi pembinaan atlet di lapangan. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya berfokus pada pelaksanaan kebijakan, tetapi juga pada identifikasi masalah, proses pelaksanaan, serta evaluasi terhadap efektivitas kebijakan pembinaan olahraga prestasi.

Analisis dalam penelitian ini juga mempertimbangkan konteks kebijakan daerah yang menjadi landasan pelaksanaan pembinaan olahraga, yaitu Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. Peraturan daerah tersebut menjadi dasar dalam melihat bagaimana kebijakan pembinaan atlet berprestasi dirancang dan dilaksanakan di tingkat

daerah, khususnya dalam aspek perencanaan program, pendanaan, penyediaan sarana dan prasarana, serta pemberian penghargaan kepada atlet.

Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai kebijakan pemerintah daerah dalam pembinaan atlet sepak takraw berprestasi di Kota Bandar Lampung, mulai dari proses perumusan masalah kebijakan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan program, hingga evaluasi terhadap hasil kebijakan dalam mendukung peningkatan prestasi atlet secara berkelanjutan.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ditetapkan pada ekosistem pembinaan prestasi olahraga di Kota Bandar Lampung, dengan fokus utama pada KONI Kota Bandar Lampung sebagai lembaga pelaksana kebijakan pembinaan atlet berprestasi melalui cabang olahraga. Penetapan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa KONI merupakan aktor kunci yang menerjemahkan kebijakan dan dukungan pemerintah daerah ke dalam program pembinaan prestasi yang bersifat operasional dan berorientasi pada capaian atlet.

Adapun lokasi penelitian meliputi:

1. KONI Kota Bandar Lampung Sebagai lokus utama penelitian, KONI Kota Bandar Lampung diposisikan sebagai lembaga yang memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan pembinaan prestasi olahraga daerah. KONI bertanggung jawab dalam perencanaan program pembinaan, pendistribusian dukungan anggaran kepada cabang olahraga, serta pengawasan pelaksanaan pembinaan atlet berprestasi. Dalam konteks penelitian ini, KONI menjadi simpul utama dalam hubungan antara kebijakan pemerintah daerah dan praktik pembinaan atlet sepak takraw.
2. Pengurus Cabang Olahraga Sepak Takraw Kota Bandar Lampung, Cabang olahraga sepak takraw menjadi unit analisis utama pada tingkat implementasi kebijakan. Pengurus cabang olahraga berperan sebagai pelaksana teknis pembinaan prestasi, termasuk penyusunan program latihan, pengelolaan atlet, serta pemanfaatan dukungan kebijakan dan pendanaan yang disalurkan melalui KONI.

3. Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kota Bandar Lampung, Dispora diposisikan sebagai bagian dari konteks kebijakan, yaitu instansi pemerintah daerah yang berperan dalam penyediaan dukungan anggaran dan regulasi pembinaan olahraga. Keterlibatan Dispora dalam penelitian ini difokuskan pada pemahaman kebijakan pendanaan dan arah pembinaan prestasi olahraga daerah, tanpa menjadikannya sebagai lokus utama penelitian.
4. Fasilitas latihan dan arena pertandingan sepak takraw Meliputi lapangan atau gedung olahraga yang digunakan oleh atlet sepak takraw Kota Bandar Lampung dalam proses latihan dan persiapan kompetisi. Lokasi ini diamati untuk memahami kesesuaian fasilitas dengan kebutuhan pembinaan prestasi atlet.

Penetapan lokasi penelitian ini memungkinkan peneliti memperoleh gambaran yang utuh mengenai bagaimana kebijakan pembinaan atlet berprestasi dioperasionalkan oleh KONI melalui cabang olahraga, serta bagaimana kebijakan tersebut berkontribusi terhadap capaian prestasi atlet sepak takraw Kota Bandar Lampung.

Pemilihan subjek penelitian dilakukan menggunakan purposive sampling, dengan pertimbangan bahwa informan dipilih berdasarkan kapasitas, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam pembinaan atlet sepak takraw. Apabila diperlukan, teknik *snowball* sampling digunakan untuk memperluas informan guna melengkapi dan memperdalam data penelitian.

Subjek penelitian meliputi:

1. Pengurus KONI Kota Bandar Lampung Terutama pengurus yang membidangi pembinaan prestasi dan pengelolaan cabang olahraga. Informan ini dipilih untuk menggali kebijakan, mekanisme pendanaan, serta strategi pembinaan prestasi yang diterapkan KONI terhadap cabang olahraga sepak takraw.
2. Pengurus Cabang Olahraga Sepak Takraw Kota Bandar Lampung, Sebagai pelaksana langsung pembinaan atlet, pengurus cabang olahraga menjadi informan utama untuk memahami implementasi kebijakan pembinaan prestasi,

pengelolaan atlet, serta tantangan yang dihadapi dalam mencapai prestasi di tingkat nasional.

3. Atlet Sepak Takraw Kota Bandar Lampung Khususnya atlet yang terlibat dalam pembinaan prestasi dan berkontribusi pada capaian Juara III PON Tahun 2024. Atlet menjadi subjek penting untuk menggali pengalaman langsung terkait proses pembinaan, dukungan kebijakan, dan dampak kebijakan terhadap performa atlet.
4. Kepala Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kota Bandar Lampung, sebagai aktor pemerintahan daerah dan penyalur dana hibah untuk keperluan keolahragaan yang ada ditingkat Kota Bandar Lampung

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian bertujuan untuk membatasi ruang lingkup pembahasan dalam penelitian kualitatif sehingga peneliti dapat menentukan data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Dengan adanya fokus penelitian, peneliti dapat lebih terarah dalam mengumpulkan data serta menganalisis permasalahan secara mendalam sesuai dengan tujuan penelitian.

Penelitian ini difokuskan pada analisis implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pembinaan atlet sepak takraw berprestasi di Kota Bandar Lampung. Fokus utama penelitian tidak hanya pada keberadaan kebijakan pembinaan atlet, tetapi juga pada bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan oleh pihak terkait seperti pemerintah daerah, KONI, serta pengurus cabang olahraga dalam mendukung peningkatan prestasi atlet.

Dalam menganalisis pelaksanaan kebijakan pembinaan atlet tersebut, penelitian ini mengacu pada teori analisis kebijakan yang dikemukakan oleh William Dunn yang meliputi:

1. Perumusan Masalah (*Problem Formulation*) Tahap untuk mengidentifikasi dan merumuskan masalah kebijakan secara jelas sebagai dasar penentuan arah kebijakan.

2. Peramalan (*Forecasting*) Tahap untuk memperkirakan dampak yang mungkin terjadi dari alternatif kebijakan yang dipilih.
3. Rekomendasi (*Recommendation*) Tahap penyusunan alternatif kebijakan terbaik berdasarkan hasil analisis sebelumnya.
4. Pemantauan (*Monitoring*) Tahap pengumpulan informasi untuk melihat pelaksanaan dan dampak awal kebijakan di lapangan.
5. Evaluasi (*Evaluation*) Tahap penilaian efektivitas kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya, untuk memahami faktor yang mempengaruhi semangat atlet dalam mencapai prestasi, penelitian ini juga mengacu pada teori motivasi kebutuhan yang dikemukakan oleh McClelland yang meliputi:

1. Kebutuhan Berprestasi (*Need for Achievement*)
Menilai dorongan atlet untuk mencapai prestasi serta meningkatkan kemampuan dalam cabang olahraga yang dijalani.
2. Kebutuhan Kekuasaan (*Need for Power*)
Menilai dorongan atlet untuk memiliki peran penting dan memberikan pengaruh dalam tim.
3. Kebutuhan Afiliasi (*Need for Affiliation*)
Menilai keinginan atlet untuk menjalin hubungan baik serta bekerja sama dengan rekan satu tim.

Dengan demikian, fokus penelitian ini menempatkan implementasi kebijakan pembinaan atlet sebagai aspek utama yang dianalisis, kemudian melihat bagaimana faktor motivasi atlet turut berperan dalam mendukung pencapaian prestasi olahraga daerah. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai keterkaitan antara pelaksanaan kebijakan pembinaan dan motivasi atlet dalam meningkatkan prestasi olahraga di Kota Bandar Lampung.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Lofland dalam Moleong (2017) menyebutkan penelitian kualitatif, data primer yang didapat dari ucapan dan perilaku subjek penelitian, sedangkan dokumen digunakan

sebagai sumber data pendukung. Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Data Primer

Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung terhadap atlet sepak takraw berprestasi, pelatih, pengurus cabang olahraga, serta pihak terkait seperti KONI dan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bandar Lampung sebagai pelaksana kebijakan pembinaan olahraga. Peneliti melakukan observasi terhadap proses latihan, pelaksanaan program pembinaan, serta kondisi fasilitas olahraga yang digunakan dalam pembinaan atlet. Dalam proses wawancara, peneliti menggunakan alat bantu berupa perekam suara dan catatan lapangan untuk mendokumentasikan informasi yang diperoleh dari informan.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi yang berkaitan dengan kebijakan pembinaan olahraga, antara lain peraturan daerah, program kerja dan laporan pembinaan olahraga dari KONI Kota Bandar Lampung, data prestasi atlet, serta dokumen dari Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Selain itu, data sekunder juga diperoleh dari buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang relevan dengan kebijakan publik, pembinaan olahraga, serta motivasi atlet sebagai landasan teoritis dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data untuk memperoleh informasi yang komprehensif dan mendalam mengenai kebijakan pemerintah daerah dalam mendukung pembinaan atlet berprestasi, yang dilaksanakan melalui KONI Kota Bandar Lampung, khususnya pada cabang olahraga sepak takraw. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara mendalam dan observasi lapangan.

3.5 Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang dianggap mengetahui, memahami, serta terlibat langsung dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam pembinaan atlet sepak takraw berprestasi di Kota Bandar Lampung.

Informan dipilih berdasarkan relevansi dengan fokus penelitian, sehingga data yang diperoleh dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya di lapangan.

Dalam penelitian kualitatif ini, penentuan informan dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu. Teknik ini digunakan dengan asumsi bahwa informan yang dipilih memiliki pengetahuan, pengalaman, serta keterlibatan langsung dalam proses pembinaan atlet sepak takraw (Moleong, 2018).

Adapun informan dalam penelitian ini terdiri dari unsur organisasi olahraga dan atlet sebagai penerima manfaat kebijakan. Secara rinci, informan penelitian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3. Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan	Alasan
1.	Dwi Priyono	Ketua Bidang Pembinaan Prestasi KONI Kota Bandar Lampung	Mengetahui kebijakan dan pelaksanaan pembinaan olahraga prestasi
2.	Abdul Malik	Pembina Cabang Olahraga Sepak Takraw	Bertanggung jawab dalam pembinaan dan pengembangan atlet
3.	Rahul Akbar	Atlet Sepak Takraw	Sebagai penerima manfaat kebijakan pembinaan
4.	Aldi Pratama	Atlet Sepak Takraw	Memberikan pengalaman langsung terkait pembinaan dan motivasi

Sumber: Diolah Peneliti, 2026.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Pada umumnya, data dalam penelitian kualitatif diperoleh melalui proses observasi, wawancara, serta dokumentasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian awal dilakukan untuk memperoleh gambaran umum mengenai kondisi pembinaan atlet sepak takraw di Kota Bandar Lampung melalui pengamatan langsung terhadap

kegiatan latihan serta sistem pembinaan yang berjalan. Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara dengan sejumlah informan yang berkaitan dengan kebijakan pembinaan atlet sepak takraw, seperti atlet, pelatih, pengurus cabang olahraga, serta pihak KONI Kota Bandar Lampung.

1. Wawancara

Informasi yang tidak dapat diperoleh melalui pengamatan biasanya didapatkan melalui wawancara. Oleh karena itu, untuk mengetahui pandangan, pengalaman, serta pemahaman informan terkait kebijakan pembinaan atlet sepak takraw, peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan para informan. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan kepada atlet sepak takraw berprestasi, pelatih, pembina cabang olahraga, serta pengurus KONI Kota Bandar Lampung guna memperoleh data mengenai pelaksanaan kebijakan, proses pembinaan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi atlet.

2. Observasi

Teknik observasi digunakan untuk melengkapi data yang tidak dapat diperoleh melalui wawancara. Melalui observasi, peneliti dapat mengamati secara langsung kondisi di lapangan yang berkaitan dengan proses pembinaan atlet. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan dengan mengamati kegiatan latihan atlet sepak takraw, kondisi fasilitas olahraga, serta interaksi antara atlet, pelatih, dan pengurus dalam proses pembinaan. Observasi ini bertujuan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai pelaksanaan kebijakan pembinaan olahraga di Kota Bandar Lampung.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari berbagai dokumen yang relevan dengan penelitian (Moleong, 2017). Teknik ini digunakan sebagai data pendukung untuk memperkuat hasil wawancara dan observasi. Dalam penelitian ini, dokumentasi diperoleh dari data prestasi atlet sepak takraw, program pembinaan dari KONI Kota Bandar Lampung, serta dokumen lain yang berkaitan dengan kebijakan pembinaan olahraga daerah, termasuk foto kegiatan latihan dan arsip pendukung lainnya.

3.7 Teknik Pengelolaan Data

Aktivitas pengelolaan informasi dalam studi ini terdiri dari beberapa langkah, yaitu:

1. Editing Data

Editing data merupakan tahapan penelitian yang bertujuan untuk memastikan bahwa data yang berhasil diperoleh valid dan siap untuk diproses ke tahap selanjutnya. Peneliti memeriksa, memperbaiki, dan menyusun data agar konsisten, lengkap, dan bebas dari kesalahan sebelum dilakukan analisis lebih lanjut. Peneliti menyeleksi serta menyesuaikan hasil wawancara dengan pedoman pertanyaan yang telah disusun, lalu memilah data yang relevan untuk keperluan penulisan. Dalam pengolahan hasil observasi, peneliti menghimpun informasi penting yang ditemukan di lapangan agar dapat disajikan secara jelas dan didukung oleh dokumentasi yang memperkuat pembahasan penelitian.

Proses editing meliputi pengecekan kejelasan jawaban informan mengenai pelaksanaan kebijakan, seperti aspek komunikasi kebijakan, ketersediaan sumber daya, sikap pelaksana, serta struktur birokrasi dalam pembinaan atlet. Selain itu, peneliti juga menyeleksi data yang berkaitan dengan program pembinaan, pendanaan, fasilitas latihan, dan pemberian penghargaan kepada atlet. Data yang telah diseleksi kemudian disusun secara sistematis agar memudahkan dalam proses analisis implementasi kebijakan.

2. Interpretasi Data

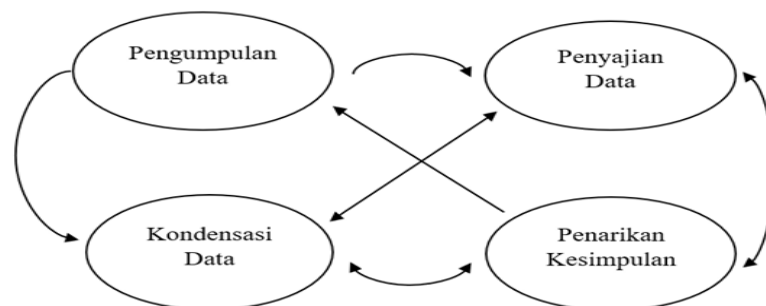
Tahap ini merupakan proses di mana peneliti menyusun dan menguraikan data yang telah disesuaikan melalui tahap editing dengan fokus penelitian selanjutnya dianalisis menggunakan hasil diskusi wawancara, observasi, dan dokumentasi yang telah disesuaikan berdasarkan kriteria pertanyaan penelitian. atau aspek tertentu. Dalam tahap interpretasi, peneliti menyajikan penjelasan dalam bentuk narasi deskriptif, agar informasi yang dikumpulkan dapat diolah secara runtut sesuai dengan tujuan penelitian.

Data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dianalisis secara deskriptif untuk menjelaskan bagaimana kebijakan pemerintah daerah dalam pembinaan

atlet sepak takraw di Kota Bandar Lampung diimplementasikan oleh instansi terkait. Peneliti kemudian menyusun hasil interpretasi dalam bentuk narasi yang sistematis guna menggambarkan kondisi implementasi kebijakan, termasuk hambatan yang dihadapi serta dampaknya terhadap pembinaan dan keberlanjutan prestasi atlet. Dengan demikian, interpretasi data dalam penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan temuan, tetapi juga menjelaskan keterkaitannya dengan teori dan fokus penelitian.

3.8 Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini, peneliti menerapkan pendekatan analisis data model interaktif yang diperkenalkan oleh Miles, dkk. (2014). Model ini dipilih karena menyediakan struktur yang teratur dalam menganalisis data kualitatif melalui tiga langkah utama, yaitu pengurangan data, presentasi data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi yang dilakukan secara interaktif dan berulang sejak tahap awal pengumpulan data hingga selesai penelitian, sehingga hasil yang didapat lebih mendalam dan sesuai dengan tujuan penelitian.



Gambar 2. Komponen Analisis Data Interaktif Miles, dkk, 2014

Sumber: Miles, dkk, 2014

Menurut Miles, dkk, (2014), ada tiga kegiatan pokok yang terlibat dalam teknik analisis data yang digambarkan pada Gambar 2.

1. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Kondensasi data merupakan proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, serta transformasi data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tahap ini dilakukan setelah peneliti mengumpulkan data lapangan terkait pembinaan atlet sepak takraw di Kota Bandar Lampung.

Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dan difokuskan pada aspek-aspek yang relevan dengan penelitian, seperti komunikasi kebijakan, ketersediaan sumber daya, disposisi pelaksana, serta struktur birokrasi dalam pembinaan atlet. Proses ini bertujuan untuk menyederhanakan data agar lebih terarah sesuai dengan fokus penelitian.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

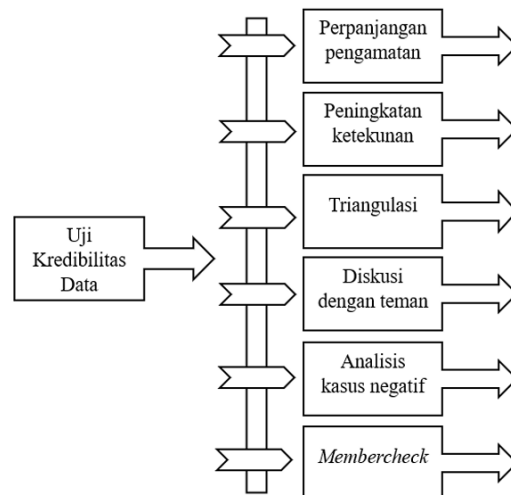
Penyajian data dilakukan setelah proses kondensasi data selesai. Pada tahap ini, data disusun secara sistematis agar mudah dipahami dan dianalisis lebih lanjut. Dalam penelitian ini, data disajikan dalam bentuk uraian naratif yang menjelaskan hasil penelitian mengenai kebijakan pembinaan atlet sepak takraw. Selain itu, penyajian data juga dapat didukung dengan tabel atau dokumentasi pendukung untuk memperjelas kondisi di lapangan.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam analisis data yang dilakukan dengan menginterpretasikan seluruh data yang telah diperoleh. Kesimpulan disusun berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang berkaitan dengan kebijakan pembinaan atlet sepak takraw di Kota Bandar Lampung. Pada tahap ini, peneliti juga melakukan verifikasi data untuk memastikan keabsahan temuan penelitian. Hasil kesimpulan digunakan untuk menjawab rumusan masalah serta menjadi dasar dalam memberikan rekomendasi terkait peningkatan kebijakan pembinaan atlet sepak takraw di Kota Bandar Lampung.

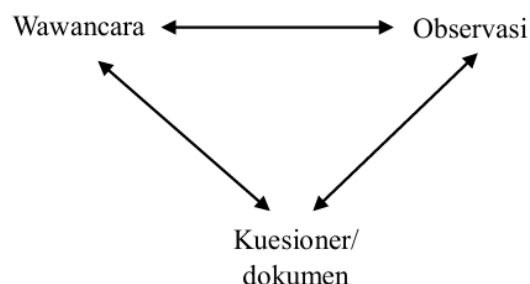
3.9 Teknik Keabsahan Data

Merujuk pada pendapat Sugiyono (2013), pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian kualitatif dengan uji *credibility*. Berdasarkan Gambar 4, terlihat bahwa uji *credibility* atau uji kredibilitas sebagai bentuk keabsahan data dalam penelitian kualitatif dilakukan melalui perpanjangan pengamatan. Melalui tahapan ini, peneliti kembali ke lapangan untuk melaksanakan wawancara dengan sumber data baru, yaitu Bapak Drs. Hi. Dwi Priyono, M.Pd selaku Ketua Bidang Pembinaan Prestasi KONI Kota Bandar Lampung.



Gambar 3. Pengujian Kredibilitas Data pada Penelitian Kualitatif
Sumber: Sugiyono, 2013

Untuk menilai kredibilitas atau tingkat kepercayaan data, peneliti juga menerapkan triangulasi. Pada uji kredibilitas, triangulasi dimaknai sebagai upaya memverifikasi data melalui berbagai sumber, cara, dan rentang waktu yang berbeda (Sugiyono, 2013).



Gambar 4. Triangulasi Teknik
Sumber: Sugiyono, 2013

Triangulasi merupakan metode untuk menguji kredibilitas data melalui berbagai sumber, metode, dan waktu (Sugiyono, 2013). Dalam penelitian ini, digunakan triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dengan memeriksa informasi yang telah dikumpulkan melalui berbagai sumber, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Triangulasi teknik dilakukan dengan menggabungkan beberapa metode pengumpulan data, yaitu wawancara, dokumentasi, serta observasi. Wawancara dilakukan dengan atlet sepak takraw berprestasi, pelatih, pembina cabang olahraga, serta pengurus KONI Kota

Bandar Lampung sebagai pihak yang terlibat langsung dalam proses pembinaan atlet.

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan bukti fisik berupa data prestasi atlet, program pembinaan olahraga, serta arsip kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan atlet sepak takraw di Kota Bandar Lampung. Sementara itu, observasi dilakukan dengan melihat secara langsung proses pembinaan atlet, seperti kegiatan latihan, kondisi fasilitas olahraga, serta interaksi antara atlet, pelatih, dan pengurus dalam pelaksanaan pembinaan. Dengan demikian, triangulasi teknik dalam penelitian ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh memiliki tingkat keabsahan yang tinggi serta dapat dipertanggungjawabkan dalam menjawab permasalahan penelitian mengenai kebijakan pemerintah daerah dalam pembinaan atlet sepak takraw berprestasi di Kota Bandar Lampung.

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kebijakan pemerintah daerah dalam mendukung pembinaan atlet sepak takraw berprestasi di Kota Bandar Lampung, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pembinaan atlet telah dilaksanakan melalui koordinasi antara Dinas Kepemudaan dan Olahraga dengan KONI Kota Bandar Lampung, serta cabang olahraga sebagai pelaksana teknis pembinaan. Program pembinaan diwujudkan dalam bentuk latihan rutin, fasilitasi keikutsertaan dalam kejuaraan, penyediaan pelatih, dukungan fasilitas latihan, serta pemberian penghargaan prestasi bagi atlet yang berhasil meraih juara. Kebijakan tersebut menunjukkan adanya peran pemerintah daerah dalam menjaga keberlangsungan pembinaan atlet sepak takraw berprestasi di daerah.

Peran pemerintah daerah dalam mendukung prestasi atlet sepak takraw pada dasarnya bersifat fasilitatif dan koordinatif, yaitu melalui pemenuhan kebutuhan atlet selama kompetisi, pemberian bonus prestasi, penyediaan sarana latihan, serta koordinasi pembinaan melalui KONI dan cabang olahraga. Dukungan tersebut terbukti berkontribusi terhadap peningkatan motivasi latihan atlet dan keberhasilan meraih prestasi, termasuk pada tingkat nasional. Namun demikian, dukungan pembinaan masih cenderung meningkat menjelang kejuaraan dan belum sepenuhnya berbasis sistem pembinaan jangka panjang yang terstruktur dan berkelanjutan, sehingga proses pembinaan belum berjalan secara optimal sepanjang tahun.

Pelaksanaan pembinaan atlet sepak takraw masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan anggaran pembinaan pada cabang olahraga sepak takraw, keterbatasan sarana dan prasarana khusus cabang olahraga, ketidakkonsistenan realisasi dukungan finansial atlet seperti bonus berkala, keterbatasan kualitas dan kehadiran pelatih, serta belum optimalnya sistem pembinaan usia dini dan pencarian bibit atlet. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pembinaan olahraga prestasi daerah belum sepenuhnya optimal pada aspek sumber daya, fasilitas, dan sistem pembinaan berkelanjutan.

Berdasarkan analisis teori evaluasi kebijakan William N. Dunn, kebijakan pembinaan atlet sepak takraw di Kota Bandar Lampung dapat dikatakan telah berjalan namun belum sepenuhnya optimal. Efektivitas kebijakan terlihat dari adanya prestasi atlet dan keberlangsungan program pembinaan, tetapi prestasi belum konsisten dan berkelanjutan secara luas. Pemerataan kebijakan telah menjangkau atlet berprestasi sebagai sasaran utama, namun distribusi manfaat dan dukungan belum sepenuhnya merata dan konsisten. Responsivitas kebijakan cukup terlihat pada dukungan pembinaan teknis dan penghargaan prestasi, tetapi masih lemah pada aspek kesejahteraan finansial berkelanjutan. Kecukupan kebijakan belum memadai karena keterbatasan fasilitas dan anggaran pembinaan, sedangkan ketepatan kebijakan sudah relevan dengan tujuan peningkatan prestasi namun belum didukung sistem pembinaan jangka panjang dan berjenjang. Secara keseluruhan, kualitas kebijakan pembinaan berada pada tingkat cukup dan masih memerlukan penguatan pada aspek perencanaan strategis, konsistensi dukungan sumber daya, serta sistem pembinaan berkelanjutan.

Motivasi atlet sepak takraw berdasarkan teori McClelland menunjukkan bahwa kebutuhan berprestasi (*need for achievement*) merupakan motivasi yang paling dominan, diikuti kebutuhan afiliasi (*need for affiliation*) melalui hubungan tim yang solid, serta kebutuhan pengakuan (*need for power*) melalui prestasi dan penghargaan. Atlet memiliki dorongan internal yang kuat untuk meraih prestasi dan membawa nama daerah dalam kompetisi. Namun, keterbatasan kebijakan pembinaan seperti fasilitas, kualitas pelatih, kesempatan kompetisi, dan konsistensi

penghargaan berpotensi mempengaruhi stabilitas motivasi atlet dalam jangka panjang.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat keterkaitan antara kualitas kebijakan pembinaan pemerintah daerah dan tingkat motivasi atlet sepak takraw. Kebijakan pembinaan yang belum sepenuhnya optimal membatasi aktualisasi motivasi atlet secara maksimal, meskipun secara internal atlet memiliki dorongan berprestasi yang tinggi. Oleh karena itu, penguatan kebijakan pembinaan olahraga daerah yang lebih sistematis, konsisten, dan berkelanjutan sangat diperlukan untuk meningkatkan motivasi, kualitas pembinaan, dan prestasi atlet sepak takraw secara lebih optimal di Kota Bandar Lampung.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kebijakan pemerintah daerah dalam mendukung pembinaan atlet sepak takraw berprestasi di Kota Bandar Lampung, peneliti memberikan beberapa saran sebagai upaya perbaikan dan penguatan pembinaan olahraga prestasi daerah ke depan. Pemerintah daerah disarankan untuk menyusun kebijakan pembinaan atlet yang lebih sistematis dan berjangka panjang, dengan perencanaan program pembinaan berjenjang mulai dari usia dini hingga atlet prestasi. Perencanaan tersebut perlu didukung oleh alokasi anggaran pembinaan yang lebih konsisten dan memadai, sehingga kegiatan latihan, pemusatan latihan, serta keikutsertaan dalam kompetisi dapat berlangsung secara berkelanjutan sepanjang tahun, tidak hanya menjelang kejuaraan. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu meningkatkan kualitas sarana dan prasarana khusus cabang olahraga sepak takraw agar sesuai dengan standar latihan dan kompetisi, sehingga proses pembinaan dapat berlangsung lebih optimal.

Kepada KONI Kota Bandar Lampung dan cabang olahraga sepak takraw, disarankan untuk memperkuat sistem pembinaan atlet secara terstruktur melalui program pembinaan berkelanjutan, peningkatan kualitas pelatih, serta sistem monitoring dan evaluasi prestasi atlet secara berkala. Kehadiran pelatih profesional yang konsisten dalam proses latihan perlu menjadi perhatian utama, karena kualitas pelatih berpengaruh langsung terhadap peningkatan kemampuan teknik dan mental atlet. Selain itu, KONI dan cabang olahraga juga diharapkan dapat mengembangkan

program pencarian dan pembinaan bibit atlet usia dini melalui kerja sama dengan sekolah dan klub olahraga, sehingga regenerasi atlet sepak takraw dapat terjamin secara berkelanjutan.

Bagi atlet sepak takraw, disarankan untuk terus mempertahankan motivasi berprestasi, disiplin latihan, dan komitmen terhadap pembinaan yang dijalankan, meskipun masih terdapat keterbatasan dalam dukungan pembinaan. Atlet juga diharapkan dapat meningkatkan kemandirian dalam menjaga kondisi fisik, keterampilan teknik, serta mental bertanding sebagai bagian dari profesionalisme atlet. Selain itu, atlet diharapkan dapat menjalin komunikasi yang baik dengan pelatih dan pengurus cabang olahraga agar setiap kendala pembinaan dapat segera diatasi secara bersama.

Selain fokus pada pencapaian prestasi olahraga, atlet juga disarankan untuk mempersiapkan pengembangan pendidikan maupun keterampilan kerja di luar bidang olahraga sebagai bentuk persiapan karier jangka panjang. Hal tersebut penting mengingat karier atlet memiliki keterbatasan usia produktif serta belum sepenuhnya didukung oleh kepastian kesejahteraan yang berkelanjutan. Dengan memiliki kemampuan atau pekerjaan di luar olahraga, atlet diharapkan tetap memiliki jaminan keberlanjutan ekonomi dan masa depan setelah tidak lagi aktif sebagai atlet prestasi.

Secara umum, peningkatan kualitas kebijakan pembinaan olahraga prestasi daerah memerlukan sinergi antara pemerintah daerah, KONI, cabang olahraga, pelatih, dan atlet. Pembinaan yang terencana, konsisten, dan berkelanjutan diyakini akan mampu meningkatkan kualitas motivasi, proses pembinaan, dan prestasi atlet sepak takraw secara lebih optimal di Kota Bandar Lampung pada masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, A. A., Nurfarida, R., Budiyanti, N., & Zakiah, Q. Y. (2020). Model analisis kebijakan pendidikan. *Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah*, 4(2), 192-201.
- Fatmariyanti, Y., & Fauzi, A. (2023). Kebijakan publik versi William Dunn: Analisis dan implementasi. *Journal of Humanities and Social Studies*, 1(1), 1-9.
- Jakar, G. S. (2020). Private and Public Sports Venue Development Dilemmas: Economic Geography, Sport Venue Development, and Public Finance [University of Michigan]. <https://hdl.handle.net/2027.42/163045>
- Lampungpro.co. (2017, 11 Juni). Atlet mahasiswa bulu tangkis UBL juara Pomda Lampung di dua nomor. <https://lampungpro.co/news/atlet-mahasiswa-bulu-tangkis-ubl-juara-pomda-lampung-di-dua-nomor>
- Lorenza, I. L., & Sihabudin, A. A. (2022). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pembinaan Prestasi Olahraga Oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia di Kabupaten Ciamis. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8(4), 856-867.
- Miles, M. B., Hubberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). California: SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

- Meutia, I. F. (2017). Analisis kebijakan publik.
- Nazarudin, M. (2022). Implementasi Kebijakan Pembinaan Atlet Takraw Berprestasi Di Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Riau (Doctoral dissertation, Universitas Lancang Kuning).
- Pemerintah Kota Bandar Lampung. (2024). Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan keolahragaan (Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 9 Tahun 2024). Pemerintah Kota Bandar Lampung.
- Pemerintah Provinsi Lampung. (2023, 25 Oktober). Tim sepak takraw putra Lampung raih tiket ke PON 2024. Trans Sumatera. <https://transsumatera.id/2023/10/25/tim-sepak-takraw-putra-lampung-raih-tiket-ke-pon-2024/>
- Pemerintah Provinsi Lampung. (2015, 16 Desember). Sepak takraw junior Lampung meraih kemenangan pada kejuaraan nasional. Situs Resmi Pemerintah Provinsi Lampung. <https://lampungprov.go.id/detail-post/sepak-takraw-junior-lampung-meraih-kemenangan-pada-kejuaraan-nasional>
- Pemerintah Pusat RRI. (2024, 17 November). Sepak takraw pelajar Lampung lolos ke POPNas 2025. RRI.co.id. <https://rri.co.id/olimpik/1126351/sepak-takraw-pelajar-lampung-lolos-ke-popnas-2025>
- Prasetyo, D. E., Damrah, D., & Marjohan, M. (2018). Evaluasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pembinaan Prestasi Olahraga. *Gelombang Olahraga*, 1(2), 32-41.
- Putra, F. P. (2019). Pengembangan Komponen Human Capital Pada Pelaku Olahraga Kota Salatiga (Studi Pada Komite Olahraga Nasional Indonesia (Koni), Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora), dan Organisasi Cabang Olahraga Kota Salatiga Tahun 2019) (Doctoral dissertation).
- Putri, A. N., Amanita, A., & Andayani, L. (2024). Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Pemenuhan Hak Kesejahteraan Atlet

Berprestasi Di Kabupaten PURWAKARTA. *Rechtswetenschap: Jurnal Mahasiswa Hukum*, 1(1).

Raditya, R. S. (2025). Analisis Kebijakan Pendanaan Pelatihan Olahraga di Tingkat Daerah. *JPKO Jurnal Pendidikan dan Kepelatihan Olahraga*, 3(02), 42-47.

Rahadian, A., Ma'mun, A., Berliana, B., Nuryadi, N., Mutohir, T. C., & Irianto, D.

P. (2021). Gerakan sport for all kunci keberhasilan olahraga Indonesia. *Jurnal Olahraga Pendidikan Indonesia (Jopi)*, 1(1), 78-95.

Rahanra, F., & Sarkol, T. (2022). Kebijakan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Dalam Pembinaan Prestasi Atlet. *Public Policy*, 3(1), 42-51.

Ramadan, D. N., Diana, W. A., Irsyad, N. Y., & Fathannisa, T. B. (2025). Analisis Manajemen Fasilitas, SDM, dan Sistem Pembinaan Atlet di Kota Tangerang. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(4),

Rodiyah, I., Choiriyah, I. U., & Sukmana, H. (2022). Buku Ajar Kebijakan Publik. *Umsida Press*, 1-237.

Sirait, J., & Noer, K. U. (2021). Implementasi kebijakan keolahragaan dan peran pemangku kepentingan dalam peningkatan prestasi atlet. *Jurnal Olahraga Prestasi*, 17(1), 1-10.

Soan, U. F. (2017). Kebijakan dan strategi pembinaan olahraga prestasi daerah. *Jurnal Sains Keolahragaan Dan Kesehatan*, 2(1), 20.

Sosiawan, E. A. (2022). Model Komunikasi Kepelatihan untuk Peningkatan Prestasi Atlet. *Jurnal Ilmu Komunikasi UPNYK*, 19(3), 352-364.

Subhan, E. S., & Adhim, C. (2024). ANALISIS EFEKTIFITAS KINERJA KONI DALAM MENINGKATKAN PRESTASI CABOR DI KABUPATEN DOMPU. *Jurnal Manajemen dan Akuntansi (JAME)*, 1(2), 51-56.

- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tampubolon, J., & Harianja, R. R. (2020). Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Upaya Peningkatan Prestasi Atlit Sumatera Utara (Studi Kasus: Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sumatera Utara).
- Tuti Nurkhomariyah. (2024, November 22). Pemkot Bandar Lampung perkuat pembinaan atlet melalui dana hibah. RMOL Lampung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. (2022). Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional
- Wahab, S. A. (2021). *Analisis kebijakan: dari formulasi ke penyusunan model- model implementasi kebijakan publik*. Bumi Aksara.
- Wicaksono, A. P. (2022). Politik Hukum Pemerintah Republik Indonesia Dalam Menyejahterakan Kehidupan Para Atlet (Olahragawan) dan Mantan Atlet. *Jurnal Bedah Hukum*, 6(1), 44-56.